

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**STRATEGI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA
PEKANBARU DALAM MENGEMBANGKAN SEKTOR PERTANIAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



KARTIKA

NPM : 157310763

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Kartika
NPM : 157310763
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Strategi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dalam Mengembangkan Sektor Pertanian..

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 03 Februari 2020

Pembimbing I



Dr.Ahmad Fitra Yuza,MA

Pembimbing II



Andriyus,S.Sos.,M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua



Budi Muliando, S.IP., M.Si

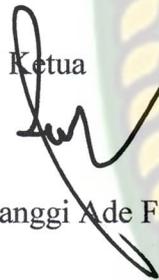
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Kartika
NPM : 157310763
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Strategi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dalam Mengembangkan Sektor Pertanian..

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Ketua



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

Anggota



Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA

Pekanbaru, 10 April 2020

Sekretaris



Andriyus, S.Sos., M.Si

Anggota



Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 087/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Kartika
N P M	: 157310763
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Strategi Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru Dalam Mengembangkan Sektor Pertanian.

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Ranggi Ade Febrian.,S.IP.,M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Dita Fisdian Adni.,S.IP.,M.IP | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Zainal.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Dr. Ahmad Fitra Yuza.,MA | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Andriyus.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Agung Wicaksono.,M.PA | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 Maret 2020
An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Bapak Rektor UIR
- 2.Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip...SK Penguji ...

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

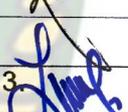
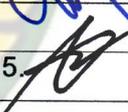
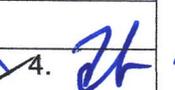
=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 087/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 24 Maret 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 26 Maret 2020 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Kartika
NPM : 157310763
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Strategi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dalam Mengembangkan Sektor Pertanian.**

Nilai Ujian : Angka : " 85 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA	Anggota	4. 
5.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Agung Wicaksono, MPA	Notulen	6. 

Pekanbaru, 26 Maret 2020
An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Kartika
NPM : 15731063
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Strategi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dalam Mengembangkan Sektor Pertanian..

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah

Pekanbaru, 10 April 2020
An. Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si
Turut Menyetujui

Andriyus, S.Sos., M.Si

Wakil Dekan I

Prodi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Dr.H.Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Budi Muliando, S.IP., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kartika
NPM : 157310763
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Strategi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dalam Mengembangkan Sektor Pertanian.

Atas naskah yang didaftarkan pada skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik telah saya dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Univeritas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 April 2020



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UIR
Nomor: 1028/UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang:
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FISIPOL UIR

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitasi oleh Dosen pembimbing;
2. Bahwa Dosen pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. SK Mendiknas. No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor No.141/UIR/Kpts/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR;
5. SK Rektor No. 112/UIR/KPTS/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan: Rekomendasi Kajur. dan WD.I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;

Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

I Nama : Dr. Ahmad Fitra Yuza.,S.IP.,MA
NIP/NPK : 130502461
Pangkat/Jabatan : III/b - Lektor
Kedudukan : **Pembimbing I**

II Nama : Andriyus, S.Sos., M.Si
NIP/NPK : 160102527
Pangkat/Jabatan : III/c – Lektor
Kedudukan : **Pembimbing II**

Pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama : **Kartika**
NPM : 157310763
Program Studi : Ilmu Pemerintahan. :
Judul Skripsi : Strategi Pemerintahan Dalam Mengembangkan Sumber Pertanian (Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Perkebunan) Di Kota Pekanbaru.

2. Pembagian dan pelaksanaan tugas Pembimbing I dan Pembimbing II berpedoman kepada SK Dekan No. 001/Fs-UIR/Kpts-PK/2010 tentang Pembagian Tugas Pembimbingan dan Perbaikan UP, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa Fisipol UIR Pekanbaru;
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalamnya segera diperbaiki sebagaimana seharusnya.

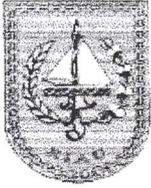
Kutipan : Surat keputusan ini disampaikan kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 November 2018
An. Dekan,

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan, disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Ketua Prodi IP
3. Yth. Ka. Labor IP
4. A r s i p. --.SK Pembimbing.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/20963
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI!**

182010

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Fisipol Universitas Islam Riau, Nomor : 349/E-UIR/27-FS/2019 Tanggal 18 Maret 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | KARTIKA |
| 2. NIM / KTP | : | 157310763 |
| 3. Program Studi | : | ILMU PEMERINTAHAN |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | Stategi dinas tanaman pangan dan hortikultura perkebunan dalam mengembangkan sektor pertanian dikota pekanbaru |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PEKANBARU,SUDIRMAN JL. IBRAHIM SATTAH NO.30 |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Maret 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Fisipol Universitas Islam Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 454/A_UIR/5-FS/2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Kartika
NPM : 157310763
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Strategi Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru Dalam Mengembangkan Sektor Pertanian
Persentase Plagiasi : 22%
Jumlah Halaman : 103 (**Abstrak s/d Daftar Pustaka**)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Februari 2020

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
NPK. 160702589



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Nomor : 349/E-UIR/27-FS/2019

Pekanbaru, 18 Maret 2019

Lampiran: -

Hal : Mohon Izin Pra-Survey

Kepada : Yth. Bapak / Ibu Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini datang menghadap Bapak/Ibu, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau atas nama :

Nama : Kartika
NIM : 157310763
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jalan Alamanda 1 Gg. Harmonis, Kec. Marpoyan
Damai, Pekanbaru.

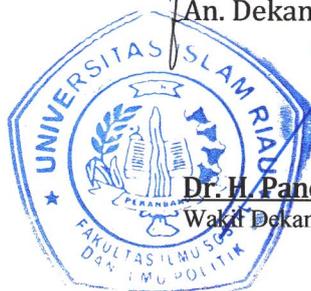
Dengan maksud mengadakan pra-survey, penulisan usulan penelitian (UP) mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :

“Strategi Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Perkebunan Dalam Mengembangkan Sektor Pertanian Di Kota Pekanbaru.”

Sehubungan dengan hal diatas, kami mohon agar Bapak/Ibu berkenan memberikan data dan informasi yang relevan kepada mahasiswa tersebut.

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
An. Dekan,



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

Wakil Dekan I Bid. Akademik



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
JALAN IBRAHIM SATTAH No. 30 TELP. (0761) 26095 FAX. (0761) 7870142
PEKANBARU

KODE POS 28131

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 800 / Distankan - Sekretariat / 843

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama/NIP : Ir. H. Syahmanar S. Umar, MM
- b. NIP : 19610606 199212 1 001
- c. Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IVc
- d. Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : Kartika
- b. NIM : 157310763
- c. Fakultas/Jurusan : Fisipol / Ilmu Pemerintahan
- d. Universitas : Universitas Islam Riau (UIR)
- e. Judul Penelitian : Strategi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan dalam Mengembangkan Sektor Pertanian di Kota Pekanbaru

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru pada bulan Desember 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 23 Desember 2019
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
Kota Pekanbaru

Ir. H. SYAHMANAR S. UMAR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610606 199212 1 001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/2060



232018

- a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/20963 tanggal 29 Maret 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : **KARTIKA**
2. NIM : 157310763
3. Fakultas : FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
4. Jurusan : ILMU PEMERINTAHAN
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. ALAMANDA 1 GG. HARMONIS NO. 12 MARPOYAN DAMAI-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : **STRATEGI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PERKEBUNAN DALAM MENGEMBANGKAN SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKANBARU**
8. Lokasi Penelitian : DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 24 Juni 2019

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU
SEKRETARIS

H.MAISISCO, S.Sos, M.Si

NIP. 19710514 199403 1 007

Tembusan

Di Sampaikan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan nikmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Strategi Dinas Pertanian dan Perikanan dalam Mengembangkan Sektor Pertanian”**. Ini Penulis Tulis Dan Diajukan Ke Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1).

Shalawat serta salam tidak lupa pula di hadiahkan kepada Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyebarkan ajaran agama islam serta mengorbankan segala jiwa dan raganya demi tegaknya Khalimatul Haq di jagat raya ini.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dan naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal tersebut penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan

bantuan dan dorongan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih terutama kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Syafrinaldi,SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau. Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr.H.Moris Adidi Yogia M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando,S.IP,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Dr.Ahmad Fitra Yuza,S.IP.,MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Andriyus,S.Sos.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan selama perkuliahan.

7. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin pengambilan data serta informasi kepada penulis terkait dengan penelitian ini.
8. Teristimewa dipersembahkan kepada Ayahanda tercinta Almarhum Nurdin yang selalu mendukung dan mendoakan saya selama masih hidupnya, dan untuk Ibunda tercinta Enis Tuti yang selalu mendoakan, mendukung, memotivasi dan memberi pengorbanan yang tulus. Saudara yang saya cintai Heri Firmansyah, Muhammad Fajri, Elvina Damayanti dan kakak ku tersayang Dewi Sarah Gusti Ayu Setiadji yang senantiasa memberikan Doa, semangat, motivasi, dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kepada sahabat saya Nuraini Wahyu Ningsih, Dila, Syurni Lia Sari, Ovita yang memberi semangat, saran serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Terimakasih juga teman-teman seperjuangan Kelas IP A 2015 atas dukungan yang telah di berikan selama ini, semoga persahabatan kita selalu terjalin walaupun jarak memisahkan.

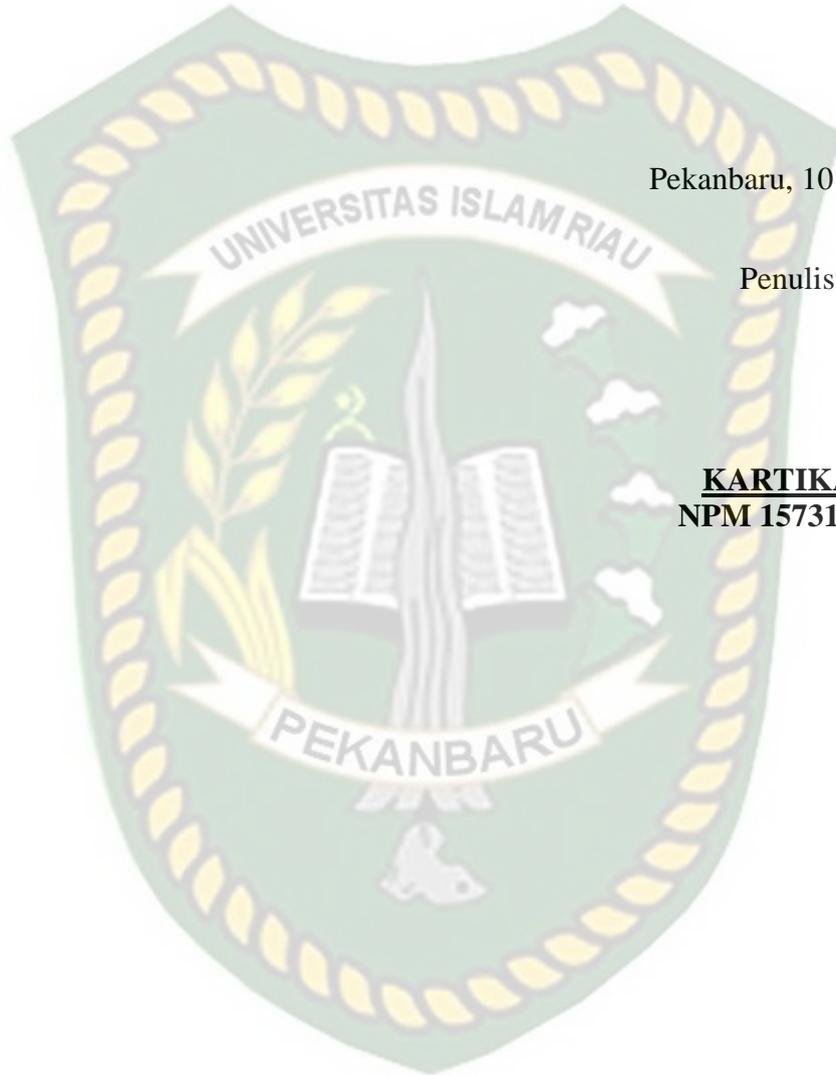
Penulis mendoakan jasa baik yang telah diberikan kepada yang disebutkan diatas dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal oleh Allah SWT. Amin
amiin amiin ya rabbal alamiin...

Akhirnya penulis, sekali lagi mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini dan dapat memberikan manfaat kepada setiap pembaca.

Pekanbaru, 10 April 2020

Penulis

KARTIKA
NPM 157310763



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

STRATEGI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU DALAM MENGEMBANGKAN SEKTOR PERTANIAN

ABSTRAK

OLEH : KARTIKA

Sektor pertanian dalam perekonomian nasional menjadi salah satu sektor yang cukup diandalkan, yang mengemban fungsi ekonomi guna penyediaan pangan, serta menciptakan lapangan pekerjaan, Untuk itu dibutuhkan strategi yang cocok dalam mengembangkan sektor pertanian. Tujuan penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dalam hal pencapaian tujuan untuk mengembangkan sektor pertanian. Metode yang dipakai didalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan ialah menurut Akdon(2011:277). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pertanian melakukan program untuk mengembangkan sektor pertanian yaitu program Peningkatan Produksi, dan Nilai Tambah Holtikultura, pengembangan kawasan pertanian, fasilitasi pengembangan hortikultura, pelatihan penyuluhan kepada petani, Pembangunan irigasi air dangkal, pemberian bantuan alat mesin pertanian, dan pengadaan teknologi tepat guna. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Strategi Dinas Pertanian dalam Mengembangkan Sektor Pertanian dapat dikategorikan cukup terlaksana dimana diketahui Program yang telah ditetapkan sudah terlaksana akan tetapi masih banyak petani yang belum mengerti penggunaan dari bantuan program tersebut dikarenakan belum dilakukannya pelatihan dan penyuluhan serta pengawasan yang rutin oleh Dinas terhadap setiap kelompok tani,dari awal kegiatan program pengembangan pertanian sampai dengan hasil pertanian. Saran untuk Dinas pertanian dan perikanan adalah Perlunya Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru melakukan pengawasan pelatihan dan penyuluhan secara rutin terhadap pertanian masyarakat atau kelompok tani agar hasil dari Program yang ditetapkan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan.

Kata Kunci: Sektor Pertanian, Strategi, Program pembangunan,

AGRICULTURE AND FISHERIES STRATEGY OF PEKANBARU CITY IN DEVELOPING AGRICULTURE SECTOR

ABSTRACT

BY: KARTIKA

The agricultural sector in the national economy is one sector that is quite reliable, which carries out the economic function of providing food, as well as creating employment. For this reason, a suitable strategy is needed in developing the agricultural sector. The purpose of this research is to study the strategies carried out by Pekanbaru Agriculture and Fisheries Office in terms of the objectives of developing the agricultural sector. The method used in this research is descriptive qualitative research. The theory used is according to Akdon (2011: 277). The results of this study indicate that the Department of Agriculture conducts programs to develop the agricultural sector, namely the Increased Production and Horticultural Value Added program, agricultural area development, horticultural development facilitation, extension instructor training for farmers, air transportation development, agricultural machine assistance, and procurement of appropriate technology. The conclusion in this study is the strategy of the Department of Agriculture in Developing the Agriculture Sector can be categorized quite implemented where the recognized program has been implemented but there are still many farmers who do not understand the use of program assistance to each farmer group, from the beginning of the agricultural program activities to agricultural products. Suggestions for agriculture and fisheries services are the need for Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Service to supervise training and supervision of community agriculture or farmer groups so that the results of the specified program can be carried out in accordance with the objectives.

Keyword: Agriculture Sector, Strategy, Development Program

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	13
1. Konsep Pemerintahan.....	13
2. Konsep Pemerintahan Daerah	15
3. Konsep Sektor Pertanian	17
4. Konsep Kewenangan.....	19
5. Konsep Organisasi Pemerintahan	20
6. Konsep Strategi	22
7. Konsep Kebijakan	26
8. Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	30
9. Otonomi Daerah.....	35
B. Kerangka Pemikiran.....	38
C. Penelitian Terdahulu	39

D. Konsep Operasional	41
E. Operasionalisasi Variabel.....	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Key informasi dan Informan	44
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Jadwal Waktu Kegiatan.....	48

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru	49
2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru	50
B. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan	51
C. Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.....	53
D. Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	60

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan	62
1. Tingkat Pendidikan	62
2. Jenis Kelamin Informan	63
3. Tingkat Umur Informan	64
B. Strategi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dalam Mengembangkan Sektor Pertanian.....	65
1. Kebijakan Organisasi	67
2. Memotivasi Pegawai	75
3. Alokasi Sumber Daya	85
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Strategi Dinas Pertanian Dan Perikanan Dalam Mengembangkan Sektor Pertanian Di Kota Pekanbaru	94

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR KEPUSTAKAAN	97



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel :

I.1	Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2019.....	6
I.2	Daftar Kelompok Tani Pertanian Kota Pekanbaru.....	7
II.1	Hasil Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kota Pekanbaru.....	8
II.2	Operasional Variabel Penelitian Strategi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dalam Mengembangkan Sektor Pertanian.....	43
III.1	Jadwal dan Waktu Kegiatan.....	48
III.2	Penyebaran Penduduk dan Luas Wilayah per Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2020.....	51
IV.1	Klafisikasi Informan Penelitian Strategi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	62
IV.2	Klafisikasi Informan Penelitian Strategi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru berdasarkan Jenis Kelamin.....	64
V.1	Klafisikasi Informan Penelitian Strategi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru berdasarkan Umur.....	64
V.2	Data Peningkatan Hasil Produksi Pertanian di Kota Pekanbaru.....	74
VI.1	Kegiatan Serta Bantuan dari Dinas kepada Kelompok Tani di Kota Pekanbaru.....	80
VI.2	Bentuk dan Kegiatan Pengembangan Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

- I.1 Lembar Wawancara Strategi Dinas Pertanian dan Perikanan dalam Mengembangkan Sektor Pertanian 103
- I.2 Dokumentasi Foto-foto Penelitian 106



DAFTAR GAMBAR

Gambar:

- I.1 Kerangka Pikir 38
- I.2 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru..... 52



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan utama dibentuknya Negara adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan undang undang Dasar 1945 alenia ke 4 yaitu melindungi segenap bangkikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam rangka mencapai tujuan Negara tersebut, maka diselenggarakan pemerintahan Negara Indonesia. Untuk mencapai keefektifan penyelenggaraan pemerintah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal(18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap tiap provinsi,

kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan kedudukan Pemerintah Daerah dan Desa dalam pasal 18B yaitu, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi, maka dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah pada pasal 12 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Pemerintah Daerah dalam urusan Pemerintahan Wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebagai penyelenggaraan

desentralisasi di daerah dimana poin c pangan pemerintah daerah sebagai pelayan dalam bidang pertanian terhadap masyarakat sebagai penunjang kesetabilan kehidupan masyarakat terutama dalam pengembangan perekonomian kehidupan masyarakat yang diperoleh oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Pengembangan pembangunan pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 207.1/Hk.140/C/02/2016 Tentang Pedoman Teknis Pengembangan Desa Mandiri Benih dimana salah satunya adalah Mewujudkan Kemandirian Pangan dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik sebagaimana yang tertera dalam 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan, Pengembangan pertanian.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimana pasal 6 Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani.

Salah satu program kebijakan pembangunan pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan mewujudkan kesejahteraan petani adalah Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) hal ini merupakan program nasional yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Program ini berupa pemberian dana bantuan penguatan modal bibit pertanian kepada petani. Petani diharapkan memanfaatkan dana tersebut untuk mengembangkan agribisnis mereka untuk meningkatkan pendapatan petani.

Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, pemerintah baik dipusat maupun di daerah mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu, ada yang berbentuk Undang-undang, Peraturan-peraturan Pemerintah, Kepres, Kepmen, Keputusan Gubernur dan lain-lain. Campur tangan pemerintah diperlukan untuk memutus rantai lingkaran kemiskinan yang tak berujung pangkal, keterkaitan timbal-balik dari beberapa Negara berkembang (seperti Indonesia) berupa sumber daya yang ada belum dikelola sebagaimana mestinya, mata pencaharian penduduk yang mayoritas pertanian berlangsung dalam kondisi yang kurang produktif, serta tingkat pertumbuhan yang tinggi dengan kualitas sumber daya manusianya yang masih relative rendah.

Pelaksanaan pengembangan Pertanian di Kota Pekanbaru tidak terlepas oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu melalui Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. Adapun pelaksanaan pengembangan pertanian oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Peraturan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dimana dikatakan pada pasal 3 Bidang Pertanian dan Perkebunan, membawahi 3 seksi yaitu:

- 1) Seksi Tanaman Pangan
- 2) Seksi Holtikultura
- 3) Seksi Perkebunan

Secara rinci dikatakan pada pasal 12 bahwa Seksi Hortikultura mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) membantu kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan sub urusan hortikultura.
- 2) Seksi Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan dan peningkatan produktifitas lahan.
 - b. peningkatan produksi buah-buahan.
 - c. pembinaan dan penyebarluasan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).
 - d. pengembangan dan peningkatan produktifitas lahan.
 - e. peningkatan produksi sayur-sayuran, tanaman hias dan biofarmaka.
 - f. pembinaan dan penyebarluasan penerapan teknologi tepat guna
 - g. penyusunan perwilayahan komoditi tanaman hortikultura.
 - h. pembinaan pengolahan hasil komoditi hortikultura.
 - i. pelaksanaan kegiatan promosi komoditi hortikultura.
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Pengembangan sektor pertanian di Kota Pekanbaru oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dengan pengembangan program tahunan yang telah ditetapkan terhadap pengembangan pertanian sektor unggulan, adapun berikut program pengembangan pertanian oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru :

Tabel I.1 Daftar Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi
1	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura	Fasilitasi Pengembangan pemberian bibit pertanian dengan ketetapan Kawasan Bawang Merah 8 ha, Cabai Merah 23 ha, Terung 14 ha (Belanja Barang untuk diserahkan kepada Kelompok Tani)	Rp.674,000,000	64.82%
2	Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal(Belanja barang dan diserahkan kepada Kelompok Tani) a. Pengadaan Sumur Bor 12 unit b. Pengadaan Mesin Pompa Air 12 unit	Rp.144,000,000	64.82 %
3	Peningkatan Produksi Pertanian	(Bantuan dalam bentuk barang) Bantuan alsintan (alat mesin pertanian) kepada kelompok tani.	- 11 unit Cultivator - 20 unit handsprayer - 1 unit koonseed - 5 unit pompa air - 6 unit traktor roda 2	65.23 %

Sumber : LAKIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas Daftar Program dan Kegiatan Pertanian di Kota Pekanbaru 2018 meliputi program Peningkatan Produksi dan Nilai Tamah Holtikultura yaitu Fasilitasi Pengembangan Kawasan Bawang Merah 8 Ha, Cabai Merah 23 ha, (Belanja barang dan diserahkan kepada Kelompok Tani) belum terlaksana 100%, Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan, dan Program Peningkatan Produksi Pertanian. Hal ini bertujuan meningkatkan

pengembangan pertanian di Kota Pekanbaru akan tetapi program yang ditetapkan belum berlangsung dengan baik dimana ketetapan program seperti bentuk penanaman bibit bawang merah dan cabai merah belum terealisasi 100% hal ini dikarenakan Dinas Pertanian dan belum mendata dan mengawasi akan keberhasilan pengembangannya pertumbuhan dari awal sampai akhir sehingga tidak memberikan hasil yang maksimal dan belum terealisasinya alat alat pengembangan pertanian sehingga menyulitkan para petani didalam menggunakan alat pertanian agar terlaksana kegiatan bertani dengan cepat dan tepat.

Program Peningkatan Produksi Nilai tambah Holtikultura bertujuan agar produksi dari berbagai sayur sayuran meningkat serta nantinya akan dikembangkan untuk memenuhi konsumsi akan cabe dikota Pekanbaru, dan didukung dengan program Peningkatan produksi pertanian dalam bentuk barang yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat tani yang tergabung dalam kelompok tani yang sudah dibentuk sebelumnya. Adapun berikut Kelompok Tani perkecamatan yang menerima bantuan program pertanian sebagai berikut :

Tabel II.2 Daftar Kelompok Tani Perkebunan Kota Pekanbaru 2019

No	Kecamatan	Ketua Kelompok Tani	Nama Kelompok Tani	Luas Lahan
1	Tampan	Simpang Baru	Mitra	14 ha
2.	Marpoyan Damai	Amril	Prima Jaya	11 ha
3	Rumbai	Tuaman	Tunas Bru Subur Makmur	20 ha

Sumber :Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas Daftar Kelompok Tani Kota Pekanbaru 2019 yang menerima bantuan program pertanian meliputi 3 kecamatan yaitu Tampan,

Marpoyan Damai, Rumbai, dimana Kecamatan Marpoyan Damai memiliki lahan paling sedikit dan yang paling banyak Kecamatan Rumbai dan Tampan, sehingga di dalam hal pengembangan sektor pertanian bagi kelompok tani perlunya Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru lebih maksimal penerapan kebijakan yang ditetapkan di dalam pengembangan pertanian terhadap kelompok Tani.

Program dan Kegiatan Pengembangan Bawang Merah, Cabai Merah dan Terung oleh Dinas Pertanian dan perikanan tahun 2019 belum memberikan dampak terhadap ketetapan program pengembangan pertanian bagi kelompok tani yang telah ditetapkan secara menyeluruh di 3 kecamatan sehingga masih banyak kawasan pertanian melalui kelompok tani yang belum menerima bantuan program pertanian sesuai dengan kebutuhan kelompok tani.

Adapun berikut hasil produksi Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel II.1 Hasil Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kota Pekanbaru 2019

No	Kecamatan	Bawang Merah	Luas Lahan	Cabai Merah	Luas Lahan	Terung	Luas Lahan
1	Tampan	567 kg	3 ha	953 kg	7 ha	6 ton	4 ha
2	Marpoyan damai	-	-	924 kg	6 ha	3 ton	5 ha
3	Rumbai	804 kg	5 ha	1.4 ton	10 ha	3 ton	5 ha

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru 2019

Berdasarkan penjelasan diatas Hasil produksi Tanaman Sayuran Bawang Merah, Cabai merah, Terung menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kota Pekanbaru 2018. Dimana terlihat kecamatan Marpoyan Damai salah satu penerima bantuan program pertanian yang paling sedikit meliputi bantuan pertanian Cabai Merah, dan Terung, sedangkan kecamatan Tampan dan Rumbai

menerima bantuan utuh meliputi Bawang Merah Cabai Merah dan Terung. Melihat perkembangan program pengembangan pertanian sayuran oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru terlihat belum memberikan bantuan pertanian terhadap kecamatan penerima program secara merata. Sehingga belum memberikan dampak penghasilan yang maksimal sesuai akan kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru sehingga perlunya strategi pencapaian pengembangan pertanian lebih baik lagi.

Kota Pekanbaru termasuk memproduksi cabe lebih banyak dari pada komoditi sayur sayuran lainnya tetapi belum menutupi konsumsi akan Cabai di kota Pekanbaru, dikarenakan konsumsi Cabai Merah di kota Pekanbaru terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana setiap bulannya kebutuhan masyarakat dalam mengkonsumsi cabe lebih kurang 150 ton cabai merah. Sedangkan kebutuhan Cabe Merah untuk satu tahunnya lebih kurang 1800 ton. Sementara kota Pekanbaru diperkirakan dapat menghasilkan 1.260 ton produksi Cabai pertahunnya, Sehingga masih kurang 540 ton Cabai yang dibutuhkan maka dari itu kota Pekanbaru hanya bisa memenuhi 80% kebutuhan akan cabai dan selebihnya dipasok dari luar kota Sumatra Barat dan Sumatra Utara. Hal inilah yang membuat saat pasokan cabai kosong maka harga langsung melambung tinggi untuk itu perlu strategi untuk mengatasi hal ini.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pengembangan program pertanian di Kota pekanbaru belum terlaksana seutuhnya dan tepat sasaran dimana diketahui bahwa pengembangan pertanian belum seutuhnya memberikan bantuan terhadap para kelompok tani sesuai dengan kebutuhan kelompok tani seperti bibit

pertanian, alat-alat pertanian dan kegiatan pembinaan pelatihan bagi kelompok tani mulai dari penanaman sampai dengan panen. Berdasarkan paparan diatas adapun yang menjadi fenomena di dalam strategi pengembangan sekto pertanian oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Strategi pengembangan pertanian melalui program kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru belum terlaksana secara merata mulai pemberian bibit pertanian, alat pertanian sesuai dengan kebutuhan kelompok tani, serta belum maksimalnya pemberian pembinaan pelatihan terhadap kelompok tani mulai dari penanaman sampai dengan panen serta penggunaan alat-alat pertanian yang diberikan.
2. Belum secara maksimalnya kegiatan program pertanian kegiatan pembinaan terhadap kelompok tani mulai dari bentuk pengolahan tanah, penanaman bibit, pemupukan, sampai dengan panen sehingga terjadinya penurunan akan hasil pertanian.
3. Belum adanya pengawasan yang rutin terhadap kelompok tani akan kegiatan pertanian serta evaluasi akan pencapaian pengembangan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan dari fenomena ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Strategi Dinas Pertanian dan Perikanan dalam Mengembangkan Sektor Pertanian**”

B. Rumusan Masalah

Seperti yang telah dijelaskan dari uraian uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : *“Bagaimana Strategi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dalam Mengembangkan Sektor Pertanian?”*

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentulah mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan yang ingin diketahui, adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Strategi Dinas Pertanian dan Perikanan dalam mengembangkan dan mengelola sektor pertanian di kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam Mengembangkan sektor Pertanian di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Guna Praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan (pemerintah) maupun pelaksana kebijakan Di Dinas Pertanian dan Pertenakan Kota Pekanbaru.

- b. Guna Akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya dan Universitas pada umumnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A.Studi Kepustakaan

1.Konsep Pemerintahan

Dalam suatu Negara agar dapat mencapai kesejahteraan dan ketentraman bagi rakyat maka diperlukan seorang pemimpin untuk mengatur dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan Negara. Dalam ilmu politik dikenal dengan istilah pemerintah.Sedangkan kegiatan pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan Negara biasanya disebut dengan istilah pemerintahan.

Secara etimologi pemerintahan adalah melakukan pekerjaan menyeluruh yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang di perintah memiliki kepatuhan akan keharusan(Syafie,2003;22).

Kata pemerintahan itu sendiri berasal dari kata dasar perintah yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki 4 unsur yaitu terdiri dari dua pihak unsur yang diperintah yaitu rakyat, unsur pemerintah itu sendiri dan antar keduanya da hubungan. Setelah mendapat awalan “pe” menjadi pemerinah yang berarti badan atau organisasi mengurus. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan dan menjadi perbuatan, cara atau perihal (Syafiee dan Andi Azikin, 2008: 15).

Pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan sehingga banyak penyebutan dari negara lain yakni inggris menyebutnya “*Government*” dan

perancis menyebut “*Gouvernement*”, keduanya berasal dari perkataan latin “*Gubernaculum*”. Dalam bahasa arab disebut “*Hukumat*”, di amerika serikat disebut “*Administration*” sedangkan belanda mengartikan “*Regering*” sebagai pengguna kekuasaan dan bijaksana dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah. Dalam Regering digunakan untuk pemerintah pada tingkat nasional sedangkan Bestuur adalah sebagai keseluruhan badan pemerintah dan kegiatannya yang langsung berhubungan dengan usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat (Inu Kencana Syafiie, 2013).

Menurut M. Ryas Rasyid (1997;7) secara umum tugas pokok pemerintahan mencakup tujuh (7) bidang, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dan menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Menjamin diterapkannya peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah atau yang lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Melakukan upaya- upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

- f. Menetapkan kebijaksanaan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- g. Menerapkan kebijaksanaan untuk pemerliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2.Konsep Pemerintahan Daerah

Untuk dapat memahami makna dari konsep pemerintahan daerah maka perlu dicermati 3(tiga) hal penting berkaitan dengan lingkup istilah pemerintahan daerah, yaitu: pertama berkaitan dengan dimensi pengertian, kedua berkaitan dengan bentuk pemerintahan daerah dan ketiga berkenaan lingkungan yang berpengaruh terhadap pemerintah daerah.

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24). Pemerintah lokal pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi/badan/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahandaerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan Pemerintah daerah (local government atau local authority). Pemerintahan lokal pada pengertian kedua menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan.

Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut sama dengan fungsi pemerintah pusat yang meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif. Pemerintahan daerah (local government) hanya melaksanakan fungsi legislatif dan fungsi eksekutif sedangkan fungsi yudikatif tetap ditangani pemerintah pusat. Fungsi legislatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah hakikatnya merupakan fungsi pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. Jadi bukan fungsi legislatif seperti halnya fungsi parlemen di mana dalam konteks Indonesia fungsi ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan fungsi yudikatif dipegang oleh badan-badan peradilan (Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan lainnya) Hoessein berpendapat Istilah legislatif dan eksekutif juga tidak lazim digunakan pada local government. Istilah yang lazim digunakan pada local government adalah fungsi pembuatan kebijakan (policy making function) dan fungsi pelaksanaan kebijakan (policy executing function). Fungsi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang diangkat/birokrat lokal.

3. Konsep Sektor Pertanian

Secara umum pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk didalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Sebagian besar kurang lebih dari 50 persen mata pencaharian masyarakat di Indonesia adalah sebagai petani, sehingga sektor pertanian sangat penting untuk dikembangkan, sedangkan arti sempit pertanian adalah sebagai budidaya penghasil tanaman pangan demi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Pengertian pertanian yang dalam arti luas tidak hanya mencakup pembudidayaan tanaman saja melainkan membudidayakan serta mengelola dibidang peternakan seperti merawat dan membudidayakan hewan ternak yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak, serta pemanfaatan hewan yang dapat membantu tugas para petani kegiatan ini merupakan suatu cakupan dalam bidang pertanian (Bukhori, 2014).

Pertanian merupakan sektor ekonomi yang utama di Negara-Negara berkembang. Peran atau kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara menduduki posisi yang penting sekali. Hal ini antara lain disebabkan beberapa faktor. Pertama, sektor pertanian merupakan sumber persediaan bahan makanan dan bahan mentah yang dibutuhkan oleh suatu Negara. Kedua tekanan-tekanan demografis yang besar di negara-negara berkembang yang disertai dengan meningkatnya pendapatan dari sebagian penduduk menyebabkan kebutuhan tersebut terus meningkat. Ketiga, sektor pertanian harus dapat menyediakan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk menyebarluaskan sektor-sektor lain terutama sektor

industri. Faktor-faktor ini biasanya berwujud modal, tenaga kerja, dan bahan mentah. Keempat, sektor pertanian merupakan sektor basis dari hubungan-hubungan pasar yang penting berdampak pada proses pembangunan. Sektor ini dapat pula menciptakan keterkaitan kedepan dan keterkaitan kebelakang yang bila disertai dengan kondisi-kondisi yang tepat dapat memberi sumbangan yang besar untuk pembangunan. Kelima, sektor ini merupakan sumber pemasukan yang diperlukan untuk pembangunan dan sumber pekerjaan dan pendapatan dari sebagian besar penduduk negara-negara berkembang yang hidup di pedesaan (Pratomo, 2010).

Sektor pertanian memiliki peranan yang penting pada pembangunan ekonomi Negara. Sumbangan atau jasa sektor pertanian pada pembangunan ekonomiterletak dalam hal:

- a. Menyediakan surplus pangan yang semakin besar kepada penduduk yang kian meningkat.
- b. Meningkatkan permintaan akan produk industri dan dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan tersier.
- c. Menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor barang-barang modal bagi pembangunan melalui eksport hasil pertanian terus-menerus.
- d. Meningkatkan pendapatan desa untuk dimobilisasi pemerintah.
- e. Memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Di negara terbelakang produksi pangan mendominasi sektor pertanian. Jika output membesar lantaran meningkatnya produktifitas, maka pendapatan para

petani akan meningkat. Kenaikan pendapatan perkapita akan sangat meningkatkan permintaan pangan. Dalam perekonomian seperti itu elastisitas pendapatan permintaan menjadi sangat tinggi. Peran nyata sektor pertanian sebagai tumpuan pembangunan ekonomi nasional pada masa krisis dan selama pemulihan ekonomi, maka sektor pertanian perlu diposisikan sebagai sektor andalan dan didukung secara konsisten.

Atas dasar tersebut, potensi perekonomian pedesaan diharapkan akan menjadi determinan dari perekonomian nasional secara keseluruhan dan dengan demikian perubahan yang terjadi pada struktur perekonomian pedesaan perlu dicermati terutama dampaknya terhadap struktur kesempatan kerja dan pendapatan di wilayah pedesaan (Resthiningrum, 2011).

4. Konsep Kewenangan

Secara umum istilah wewenang dalam konsep hukum dapat diartikan sebagai kekuasaan. Oleh karena itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja seseorang yang mempunyai wewenang formal (formal authority) dengan sendirinya mempunyai kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pemberian wewenang itu. Pada dasarnya secara yuridis konsep wewenang (authority) selalu berkaitan dengan kekuasaan (power) yang berdasarkan hukum, baik cara memperolehnya maupun cara menggunakannya. Kekuasaan yang diperoleh dan dipergunakan berdasarkan hukum yang demikian ini dalam kepustakaan lazim disebut "legal power". Istilah "power" dalam hal ini berarti: "an ability on the part of a person

to produce a change in a given legal relation by doing or not doing a given act” (Black, 1970:1169). Oleh karena itu, seperti halnya istilah “tanggung jawab” dan “kewajiban” sebagaimana tersebut di atas, dalam kepustakaan maupun undang-undang istilah “wewenang” dan “kekuasaan” juga seringkali dipakai secara bergantian untuk menyebut makna yang sama.

Sedangkan Bagir Manan (2000:1-2) berpendapat bahwa, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan . Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri , sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

5.Konsep Organisasi Pemerintahan

Teori Modern memandang organisasi sebagai suatu sistem yang berproses. Yang dimaksud ”sistem” adalah bagian-bagian dari organisasi yang berhubungan satu sama lain dan menjadi satu kesatuan secara keseluruhan. Bagian-bagian itu terdiri dari faktor-faktor luar dan dalam organisasi. Faktor luar organisasi adalah faktor lingkungan di mana organisasi itu berada seperti faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya, teknologi, hukum, demografi, dan sumber-sumber alam. Faktor dalam organisasi adalah antara lain orang-orang yang bekerja, tugas dan tanggung jawab, hubungan kerja, dana dan alat-alat, peraturan, dan prosedur kerja.

Organisasi sebagai sistem terdiri dari faktor-faktor luar dan faktor dalam yang berhubungan atau berinteraksi satu sama lain, saling pengaruh mempengaruhi sehingga merupakan suatu kebulatan. Sehubungan dengan pandangan modern ini, Chaster I. Barnard (1938) adalah orang yang pertama meletakkan dasar dari Teori Modern, mengemukakan bahwa "organisasi merupakan suatu sistem sosial yang dinamis dari hubungan kerja sama yang bertujuan untuk memuaskan keperluan orang-orang".

Selanjutnya Herbert G. Hicks dan C. Ray Gullett (1981) mendefinisikan organisasi sebagai "suatu proses yang tersusun dalam mana orang-orang berhubungan untuk mencapai tujuan". Siagian (dalam Zulkifli, 2005:25) merumuskan defenisi organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan bawahan.

Sebagai suatu proses organisasi bearti serangkaian aktifitas kolektif dari orang-orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan evaluasi pelaksanaan tugas. (Zulkifli, 2005;26).

Sedangkan menurut Hamim (2005;24) menjelaskan bahwa Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompoknya harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa memberi saluran terbaik untuk

pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan

Arti definisi organisasi dan pemerintahan diatas dapatlah disimpulkan bahwa definisi dari organisasi pemerintahan :

1. Badan adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan tertentu baik sebagai eksekutif,legislatif maupun yudikatif.
2. Bagan atau struktur adalah gambaran secara skematis tentang hubungan-hubungan kerja sama dari orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha untuk mencapai suatu tujuan yang berada di dalam lembaga-lembaga pemerintahan.
3. Organisasi yang memiliki hierarki kewenangan,tugas dan fungsi sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan baik secara struktural maupun fungsional dalam lembaga-lembaga pemerintahan yang tujuannya adalah mengimplementasikan tujuan dari negara untuk rakyatnya.

5.Konsep Strategi

Dalam lingkungan organisasi,strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang di ingkan tercapai.

Menurut Akdon (2011:277) Proses pelaksanaan strategi harus mengintegrasikan komponen-komponen yang mendukung jalannya pelaksanaan strategi tersebut. Komponen-komponen tersebut meliputi : kebijakan organisasi, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya (SDM dan Non SDM)

agar strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Adapun penjelasan dari komponen tersebut, yaitu :

1. Kebijakan Organisasi

Strategi merupakan garis besar atau pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi tersebut maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan program kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran.

2. Memotivasi Pegawai

Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan. Artinya motivasi mempersoalkan bagaimana caranya menggerakkan daya dan potensi seseorang supaya mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Alokasi Sumber Daya

Sumber daya merupakan aset, baik berupa orang dengan keterampilan dan pengetahuannya, modal finansial, fisik, serta hal-hal yang bersifat intanjibel termasuk faktor struktur dan kultural yang digunakan organisasi untuk memenuhi satu kebutuhan dan memecahkan masalah. Sumber daya dapat dikelompokkan atas sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya non manusia (*nonhuman resources*) atau sumber daya material (*material resources*). Sumber

daya manusia dinamakan juga sebagai tenaga kerja (*workforce*) atau personalia (*personnel*) merupakan orang yang bekerja untuk mencapai tujuan organisasional.

Menurut Robert M Grant (1999:21) strategi memiliki tiga peranan penting dalam mengisi tujuan manajemen, yaitu :

- a. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan. Dalam hal ini strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses. Strategi merupakan suatu bentuk atau tema yang memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi.
- b. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi untuk memberikan kesamaan arah bagi perusahaan.
- c. Strategi sebagai target. konsep strategi akan digabungkan dengan visi dan misi untuk menentukan dimana organisasi berada dalam masa yang akan datang. Penetapan tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi penyusunan strategi, tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi organisasi .

Menurut Siagian(2005:15) manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi.

Sedangkan manajemen strategi menurut Jatmiko(2004:5) adalah sebagai suatu proses dimana manajemen puncak(top management) menentukan arah jangka panjang dan kinerja atau prestasi organisasi melalui formulasi yang

cermat, implementasi dan evaluasi yang terus menerus atau strategi yang telah ditetapkan.

Proses manajemen strategi menurut David(2005:5-6) terdiri dari 3 tahap, yaitu:

1) Tahap Formulasi

Tahap ini meliputi pengembangan visi dan misi, pengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, penentuan kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal organisasi, pembuatan sasaran jangka panjang, pembuatan strategi (strategi alternatif), serta pengambilan keputusan strategi yang di pilih untuk diterapkan. Dalam hal ini penyusunan strategi terbagi ke dalam dua tahapan aktivitas, yaitu: *input stage*, dan *decision stage*.

2) Tahap Implementasi

Tahap ini meliputi penentuan sasaran tahunan, pengelolaan kebijakan, pemotivasian pegawai, pengalokasian sumber daya agar strategi yang diformulasikan dapat dilaksanakan. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan kultur yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahan usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta mengkaitkan kompensasi pegawai dengan kinerja organisasi. Pada tahap ini, keterampilan interpersonal sangatlah berperan. Strategi bukanlah sekedar aktivitas *problem-solving*, tetapi lebih dari itu strategi bersifat terbuka (*opened*) dan kreatif untuk mempertajam masa depan dalam model *chain of command* dimana suatu strategi harus dijalankan setepat mungkin (menghindari bias-bias yang tidak perlu dalam setiap bagian struktur organisasi).

3) Tahap Evaluasi

Tahap ini meliputi kegiatan mencermati apakah strategi berjalan dengan baik atau tidak. Hal ini dibutuhkan untuk memenuhi prinsip bahwa strategi organisasi haruslah secara terus-menerus disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang selalu terjadi dilingkungan eksternal maupun internal. Tiga kegiatan utama pada tahap ini adalah : (a) menganalisa factor-faktor eksternal dan internal sebagai basis strategi yang sedang berjalan; (b) pengukuran kinerja; (c) pengambilan tindakan perbaikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka strategi merupakan suatu seni dalam menyusun rencana suatu organisasi untuk memastikan tujuan yang ingin dicapai tersebut dapat tercapai dengan baik dan terlaksana dengan efektif. Strategi yang diciptakan diharapkan dapat disesuaikan dengan lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Strategi yang mampu menyesuaikan antara kemampuan dan sumber daya organisasi dengan lingkungannya dapat dipastikan mampu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

7.Konsep Kebijakan

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar program program pembangunan,pelayanan dan pemberdayaan serta tujuan berdirinya Negara dapat tercapai.

Menurut Partowidagdo dalam Anwar (2011;42) model kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman keadaan bermasalah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan

permasalahan. Manfaatnya pertama karena kebijakan public merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.

Menurut Dunn (2003:105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

- 1) Pengolahan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
- 2) Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
- 3) Penerapan sarana keputimbusan, menggunakan penilaian yang dimiliki oleh badan instansi tersebut sebagai bahan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
- 4) Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh tindakan kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelencaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (Kansil dan cristine, 2008;190)

Menurut Anderson (dalam Tangkilisan, 2003;3) menyatakan bahwa *“Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials”*. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa :

1. Kajian pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan

2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

Menurut Syafiie (2005;150) menyebutkan :”Model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model sistem dimana memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi *public polic*, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”.

Raksasataya (dalam Islamy, 2007;17) memuat tiga elemen kebijaksanaan yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Tangkilisan (2003;6) menyebutkan bahwa pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan dengan tujuannya sebagai ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif arah yang dikehendaki.

Kebijaksanaan menurut Friedrich adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (dalam Wahab 2004;3).

Selanjutnya dalam menilai pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan pengawasan, sehingga pengawasan dapat diartikan meliputi, mengawasi berjalan dan dilaksanakannya rencana, memberikan pandangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan. Menilainya dan mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Dunn (2003;608) evaluasi kebijakan adalah pencapaian penetapan kebijakan sebagai menentukan arah kebijakan yang ditetapkan yang berlangsung dalam pencapaian tujuan yang terlaksana lebih baik dari sebelumnya dengan pencapaian kebijakan melalui, Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, dan Ketepatan Lingkungan.

Menurut Carl Friedrich dalam (Wahab 2004:3) bahwa:“kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan”.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Kebijakan publik yang terbaik adalahkebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam polaketergantungan. Dimana kebijakan publik hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan, visi dan

misibersama yang telah disepakati. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah jalan untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan.

8. Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi Negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.

Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggung jawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan serta sanksi. Penyelenggraan dekosentrasi dan tugas pembantuan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan(PP 7/2008) meliputi:

- a. Pelimpahan urusan pemerintahan
- b. Tata cara pelimpahan
- c. Tata cara penyelenggaraan dan
- d. Tata cara penarikan pelimpahan

Pengelolaan dana dekosentrasi dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

1. Prinsip pendanaan

2. Perencanaan dan Penganggaran
3. Penyaluran dan pelaksanaan dan
4. Pengelolaan barang milik Negara hasil pelaksanaan dekosentrasi.

Pertanggung jawaban dan pelaporan dekosentrasi dalam Pasal 88 PP 7/2008 meliputi:

- a. Penyelenggaraan dekosentrasi dan
- b. Pengelolaan dana dekosentrasi.

Penyelenggaraan tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi :

1. Penugasan urusan pemerintahan
2. Tata cara penugasan
3. Tata cara penyelenggaraan
4. Penghentian tugas pembantuan

Pengelolaan dana tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. Prinsip pendanaan;
- b. Perencanaan dan penganggaran
- c. Penyaluran dan pelaksanaan; dan
- d. Pengelolaan barang milik Negara hasil pelaksanaan tugas pembantuan

Pertanggung jawaban dan pelaporan tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

- a. Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
- b. Pengelolaan dana tugas pembantuan.

Pelimpahan urusan Pemerintahan dalam penyelenggaraan dekosentarsi berdasarkan Pasal 11 PP 7/2008 meliputi : (1) Pelimpahan sebagian urusan

pemerintahan dapat dilakukan kepada gubernur. (2) Selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian urusan pemerintahan dapat pula dilimpahkan kepada : (a) instansi vertikal; (b) pejabat Pemerintah di daerah. Jangkauan pelayanan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat melampaui satu wilayah administrasi pemerintahan provinsi

Untuk urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan kepada gubernur dalam Pasal 13 ayat (3) PP 7/2008, didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana dekosentrasi. Pendanaan dalam rangka dekosentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat non-fisik. Penyaluran dana dekosentrasi dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara. Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan dekosentrasi merupakan penerimaan Negara dan wajib disetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua barang yang dibeli atau diperoleh oleh pelaksanaan dana dekosentrasi merupakan barang milik Negara. Barang milik Negara tersebut dapat dihibahkan kepada daerah.

Pertanggung jawaban dan pelaporan dekosentrasi mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Aspek akuntabilitas terdiri dari pelaporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas pelaporan keuangan, laporan barang. Kepala SKPD provinsi bertanggung jawab atas pelaporan kegiatan dekosentrasi. Kepala SKPD provinsi

selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dekosentrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan dana dekosentrasi.

Berkenaan dengan tugas pembantuan, pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Pemerintah provinsi juga dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dan/ atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi serta Pemerintah kabupaten/ kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/ atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan diluar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang undangan ditetapkan sebagian Urusan Pemerintah. Urusan pemerintah yang dapat ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/ kota dan atau/ pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah provinsi. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah kabupateb/kota.

Urusan pemerintahan yang dpat ditugaskan dari pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan atau/ pemerintah desa didanai dari

APBN bagian anggaran kementerian/ lembaga melalui dana tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/ atau pemerintah desa didanai dari APBD provinsi. Urusan pemerintahan yang ditugaskan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa didanai dari APBD kabupaten/kota.

Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana tugas pembantuan merupakan barang milik Negara. Barang milik Negara dapat dihibahkan kepada daerah. Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang dalam Pasal 57 ayat (2) PP 7/2008, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik Negara/ daerah. Pertanggung jawaban dan pelaporan tugas pembantuan juga mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Aspek akuntabilitas terdiri dari pelaporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan dan laporan barang. Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota selaku Kuasa Penggunaan Anggaran/ Barang tugas pembantuan bertanggung jawab atas pelaksanaan dana tugas pembantuan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas pengelolaan dan pertanggung jawaban dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan berupa pemeriksaan laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja berupa pemeriksaan atas pengelolaan

keuangan Negara yang terdiri dari pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas pengelolaan dan pertanggung jawaban dana desentralisasi dan tugas pembantuan meliputi: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan berupa pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja berupa pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara yang terdiri dari pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern Pemerintah.

9. Otonomi Daerah

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang, hak maupun kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa prinsip otonomi yang dianut adalah:

1. Otonomi luas

Otonomi luas adalah keluasaan daerah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan

daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan. Selain itu terdapat kewenangan bidang lainnya yang meliputi: a. Kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. b. Dana perimbangan Keuangan. c. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara d. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. e. Pendayagunaan Sumber daya alam serta teknologi yang strategis. f. Konservasi dan standarisasi nasional.

2. Otonomi Nyata

Otonomi nyata adalah keluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah yang berpotensi dengan khas. Bidang yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota, meliputi Pekerjaan Umum, Kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Sementara itu, otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberiaan otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari tujuan nasional.

3. Otonomi yang Bertanggung Jawab

Adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai pemberian otonomi daerah. Sementara itu, otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberiaan otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari tujuan nasional. yang berupa: a. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. b. Pengembangan hidup demokrasi. c. Keadilan dan pemerataan pembangunan. d. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menuju NKRI.

4. Keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya

Artinya mampu membangun kerjasama antara daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah, hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya negara republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Gambar 1.1: Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Strategi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dalam Mengembangkan Sektor Pertanian



Sumber: Modifikasi peneliti 2020

C.Kajian Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian ini, terdapat beberapa yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan El Syabrina (2009) yang melakukan penelitian “Analisis Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Provinsi Riau. Dari penelitian ini peneliti menyimpulkan rumusan strategi dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian di Provinsi Riau adalah membentuk badan sendiri yang spesifik menaungi penyuluhan pertanian. Program yang dapat mewujudkan pembentukan lembaga penyuluhan pertanian tersendiri di Provinsi Riau ialah : 1)Program Peningkatan Ketenagaan Penyuluh Pertanian 2)Program Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian 3) Program Penataan Kelembagaan Penyuluh Pertanian.

Siti Haerani (2010) melakukan penelitian tentang “Analisis Strategi Pengembangan Komuditas Sayuran Di Kabupaten Poso”. Adapun jenis sayuran yang diteliti ialah, sayuran tomat, bawang daun, Bawang merah kentang cabe serta kubis. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang menjadi peluang utama dalam pengembangan komoditas sayuran di Kabupaten Poso adalah Peningkatan konsumsi perkapita dan faktor yang menjadi tantangan utama adalah sistem pemasaran. Serta faktor yang menjadi kekuatan utama adalah motivasi petani dan faktor kelemahan utama adalah pengetahuan petani. Berdasarkan faktor faktor tersebut terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan komoditas sayuran di Kabupaten Poso ini, tetapi yang menjadi fokus adalah kapasitas kelembagaan tani untuk membangun kerjasama dengan pemasok dan pedagang hasil produksi. Pengembangan inipun membutuhkan penerapan

kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Poso yang terfokus pada strategi sehingga tujuan dari pengembangan komoditas ini dapat tercapai.

Rahmadani Nasution (2014) dalam penelitian yang berjudul “Strategi Pengembangan Usaha Agroindustri Lidah Buaya (Studi Kasus : Usaha Agroindustri Lidah Buaya Duta Purnaman di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru), yang menyimpulkan bahwa strategi utama yang dapat diterapkan untuk usaha tersebut adalah mempertahankan harga yang kompetitif serta kualitas yang baik. Dengan adanya harga yang kompetitif tersebut maka usaha tersebut dapat menghadapi pesaing dari luar negeri, karna produk luar negeri menerapkan harga yang lebih tinggi dari pada produk usaha Duta Purnama.

Berdasarkan penjelasan diatas adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu meliputi metode yang digunakan bahwasanya si peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga informasi yang didapat oleh sipeneliti dari informan terlihat dan terpapar secara menyeluruh, dan dari Perbedaan Teori yang digunakan untuk mengetahui Strategi pengembangan Sektor Pertanian di Kota Pekanbaru.

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan jangka panjang, didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan untuk merumuskan, menerapkan dan mengevaluasi keputusan yang membuat organisasi mampu mencapai tujuannya.
2. Kebijakan pertanian menjelaskan serangkaian hukum terkait pertanian domestik dan impor hasil pertanian. Pemerintah pada umumnya menerapkan kebijakan pertanian dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Sektor Pertanian adalah sektor yang dipergunakan untuk kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan, dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang diberikan oleh alam yakni untuk mengembangbiakkan tanaman atau hewan tersebut.
4. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional.
5. Pemerintah adalah semua atau keseluruhan badan badan yang menjalankan tugas dan fungsi kenegaraan.
6. Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi manusia.

7. Hortikultura adalah cabang pertanian tanaman yang berurusan dengan tanaman taman, umumnya buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias, berasal dari bahasa Latin hortus, “taman,” dan Colere, “untuk menumbuhkan.”
8. Pengadaan merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis.
9. Kebijakan Organisasi Strategi merupakan garis besae atau pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi tersebut.
10. Memotivasi Pegawai adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan teintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan.
11. Alokasi Sumber Daya merupakan aset, baik berupa orang dengan keterampilan dan pengetahuannya, modal finansial, fisik, serta hal-hal yang bersifat intanjibel termasuk factor struktur dan kultural yang digunakan organisasi untuk memenuhi satu kebutuhan dan memecahkan masalah.

E.Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan tiga indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel dibawah :

Tabel II.2 : Operasional Variabel Penelitian Strategi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dalam Mengembangkan Sektor Pertanian

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
Pelaksanaan Strategi harus mengintegrasikan komponen-komponen yang mendukung jalannya pelaksanaan strategi tersebut. Komponen tersebut meliputi : kebijakan organisasi, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya. Akdon(2011:277)	Mengembangkan Sektor Pertanian	Kebijakan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan Program Pertanian b. Program Bentuk Pengembangan Pertanian c. Pencapaian hasil Program Pengembangan Pertanian.
		Memotivasi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian Pelatihan dari pegawai untuk Memotivasi Kelompok Tani b. Bentuk Memotivasi dalam pengembangan pertanian. c. Kegiatan pertanian dari penanaman sampai panen.
		Alokasi Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan Pegawai dalam pengalokasian Sumber Daya b. Kerjasama dengan masyarakat dalam pengalokasian sumber daya c. Melakukan evaluasi akan hasil pertanian.

Sumber: Modifikasi penulis tahun 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe survey deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif, merupakan penelitian deskriptif yang bersifat menjelaskan, menggambarkan atau menuturkan dan menafsirkan data objek penelitian. Metode deskriptif yang diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan metode penelitian kualitatif di definisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (baik lisan maupun berupa tulisan).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru tepatnya di Jl.Ibrahim Sattah No.30 Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau dikarenakan Dinas ini adalah salah satu instansi pemerintahan yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap perkembangan pertanian di Kota Pekanbaru, Riau

C. Key Informan dan Informan

Menurut Lofland dalam Moleong (2005:157) dijelaskan bahwa penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan serta berbagai data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif bersumber dari wawancara atau

pengamatan langsung di lapangan, yang kemudian dapat dicatat melalui catatan tertulis ataupun melalui perekam suara atau dengan pengambilan foto. Penelitian kualitatif yang melalui pengamatan dan wawancara merupakan penggabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya dilakukan secara sadar, terarah dan memiliki tujuan memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui informan yaitu merupakan orang yang mengetahui dan memahami tentang objek yang diteliti oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru
2. Kepala Bidang Pertanian dan Perkebunan.
3. Pegawai Bidang Pertanian dan Perkebunan
4. Kelompok Tani

Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Sedangkan teknik Penarikan Informan yang peneliti gunakan adalah dengan teknik purposive sampling, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria dan informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang mengetahui informasi mengenai penelitian ini. Kriteria-kriteria informan dalam penelitian ini antara lain : (1) Kepala bidang , kepala seksi maupun pegawai pada bidang seksi Holtikultura (2) Petani yang mudah dalam komunikatif yang di cirikan sebagai ketua, sekretaris bendahara.

D.Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data dapat dikelompokkan atas dua kelompok Uman Sekran(2006;72) yaitu adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu merupakan data atau informasi yang di peroleh secara langsung dan dikumpulkan dari responden (Sumber data) dengan menggunakan wawancara dan hasil observasi yang berkaitan dengan penelitian tentang Strategi Pemerintah dalam mengembangkan Sektor Pertanian.

b. Data Sekunder

Yaitu merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku buku kepustakaan,jurnal,pendapat ahli,serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

E.Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka penulis melakukan pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek suatu penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subjek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian(Moleong,2005:174)

2. Kusioner yaitu dengan membagikan daftar pertanyaan kepada responden dengan maksud agar memperoleh keterangan berdasarkan pilihan alternative jawaban yang ada. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh pernyataan tertulis yang diberikan responden sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dan sifatnya jawaban tertutup, sehingga belum bisa dibuat kesimpulan.
3. Wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui dialog secara lisan dengan informan terkait dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Adapun cara melakukan wawancara ini yaitu dengan wawancara terbuka, dimana wawancara dilakukan dengan informan secara terbuka sehingga informan mengetahui bahwa penulis sedang melakukan penelitian.
4. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang keadaan lokasi penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami. Analisis data dalam penelitian menggunakan teknik kualitatif ini yaitu data informasi yang berbentuk kalimat variabel dan data kualitatif dapat diperoleh melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan dapat diperoleh

secara langsung (lapangan) yang akan dikumpulkan sesuai dengan indikator penelitian serta diuraikan untuk menarik kesimpulan.

G.Jadwal Waktu Kegiatan

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan November 2019 sampai Februari dengan 2020 :

Tabel III.1 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Strategi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dalam Mengembangkan Sektor Pertanian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke															
		Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■												
2	Seminar UP					■	■	■	■								
3	Revisi Up									■	■	■	■				
4.	Penelitian Lapangan													■	■	■	■
5	Analisis Data																
6	Penyusunan laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																
7	Konsultasi bimbingan skripsi																
8	Ujian Komprehensif Skripsi																
9	Penggadaan Skripsi																

Sumber:Modifikasi Penulis Tahun 2020

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota di Provinsi Riau, kota ini apabila dilihat dari segi geografi, terletak antara $101^{\circ}14'$ sampai $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan antara $0^{\circ}25'$ sampai $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara $34,1^{\circ}\text{C}$ – $35,6^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum berkisar antara $20,2^{\circ}\text{C}$ – $23,0^{\circ}\text{C}$. Kota Pekanbaru memiliki ketinggian berkisar antara 1 sampai 20 meter dengan curah hujan berkisar antara 62,8 - 407,8 mm pertahunnya.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Batas-batas wilayah Kota Pekanbaru apabila dilihat secara administrative yaitu terdiri dari:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan wilayah Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah selatan berbatas dengan wilayah kabupaten Siak dan Pelalawan,
- c. Sebelah Timur berbatas dengan wilayah Kabupaten Siak dan Pelalawan,
- d. Sebelah Barat berbatas dengan wilayah Kabupaten Kampar.

Jarak Kota Pekanbaru dengan Kota Kabupaten Kampar Bangkinang ± 51 km, jarak dari Kota Kabupaten Tembilahan $\pm 213,5$ km, jarak dari Kota Kabupaten Siak $\pm 74,5$ km, jarak dari Kota Kabupaten Bengkalis ± 128 km, jarak dari Kota Kabupaten Pasir $\pm 132,5$ km, jarak dari Kota Kabupaten Pelalawan (Pangkalan Kerinci) $\pm 33,5$ km, jarak dari Kota Kabupaten Rokan Hilir (Bagan Siapi-api) $\pm 192,5$ km, jarak dari kota Dumai ± 125 km, jarak dari Kota Kabupaten Meranti (Selat Panjang) ± 141 km, sedangkan jarak dari Kota Kabupaten Indragiri Hulu (rengat) adalah ± 159 km.

2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Melihat dari luas wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 1987 yang berubah dari $\pm 62,96$ km² menjadi $\pm 446,50$ km² terbagi dalam 6 kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa menjadi 8 kecamatan dan 1 Kelurahan/Desa. Sedangkan apabila menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 4 tahun 2003, Luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $\pm 632,36$ km² yang terbagi atas 12 kecamatan dan 58 Kelurahan/Desa. Berikut adalah data penyebaran penduduk di Kota Pekanbaru dan Luas wilayah perkecamatan Tahun 2018.

Tabel III.2 Penyebaran Penduduk dan Luas Wilayah per Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2019

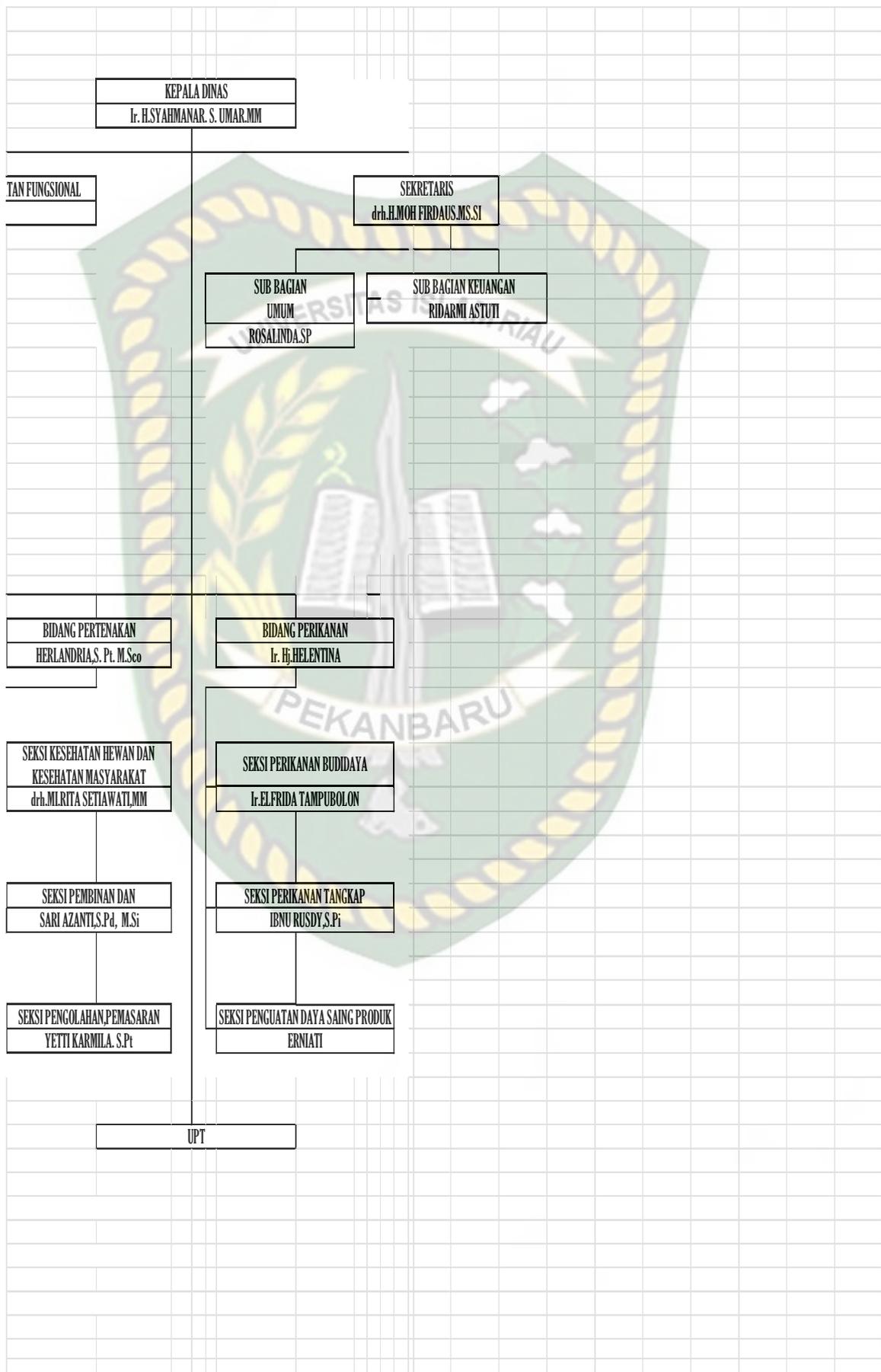
No	Kecamatan	Luas Wilayah(Km ²)	Jumlah Penduduk(Jiwa)	Kepadatan Penduduk(Jiwa/Km ²)
1	Tampan	59,81	269.062	2.837
2	Payung Sekaki	43,32	90.665	2.002
3	Bukit Raya	22,05	103.114	4.168
4	Marpoyan Damai	29,74	131.245	4.227
5	Tenayan Raya	171,27	158.519	719
6	Lima Puluh.	4,04	41.437	10.231
7	Sail	3,26	21.479	6.576
8	Pekanbaru Kota	2,26	25.094	11.089
9	Sukajadi	3,76	47.364	12.549
10	Senapelan	6,65	67.523	5.479
11	Rumbai	128,85	51.258	502
12	Rumbai Pesisir	157,33	72.516	411
	Jumlah	632,26	1.064.566	979.35

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Tahun 2020

Tabel diatas memperlihatkan tingkat kepadatan penduduk tertinggi ialah berada pada kecamatan sukajadi yaitu sebanyak 12.549 jiwa/km², dengan jumlah penduduk 47.364 jiwa serta luas wilayah 3,67 km². Kecamatan ini merupakan pusat perdagangan serta aktivitas ekonomi di Kota Pekanbaru yang terletak di tengah kota, dan apabila melihat kepadatan penduduk terendah adalah berada pada wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu 411 jiwa per km² dengan luas wilayah 157,33 km² dan jumlah penduduk sebanyak 72.516 jiwa. Rendahnya tingkat kepadatan di daerah Rumbai dikarenakan wilayah ini terletak di pinggiran kota yang merupakan daerah perbatasan antara Kota Pekanbaru dan kota yang lainnya.

B. Gambaran Singkat Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Susunan dan Tata Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru terdiri dari:



C. Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Dalam melaksanakan tugas dari anggota struktur yang mempunyai fungsi masing masing, hal ini diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 113 Tahun 2016 pasal 4, bahwa Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

i. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang perikanan serta tugas pembantuan lainnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pertanian dan perikanan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian dan perikanan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang pertanian dan perikanan
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian dan perikanan
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya
- f. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

ii. Sekretariat

Sekretaris terdiri atas dua sub bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keungan. Sub Bagian Umum mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sekretaris

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.
- b. perencanaan, penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- f. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

iii. Sub Bagian Umum

Berdasarkan Pasal 7 (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan dalam menyelenggarakan fungsi diatur dalam ayat (1) yaitu:

- a. perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- b. pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi.
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
- e. pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.

- f. pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan BMD.
- g. pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
- h. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- i. pengurusan penggunaan dan pemeliharaan BMD.
- j. perumusan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- k. pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

iv. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta merumuskan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- c. penetapan Kinerja, Laporan Evaluasi Kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja dinas.
- d. perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
- e. perumusan, pelaksanaan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
- f. pelaksanaan fasilitasi dan menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
- g. pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- h. penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).
- i. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan.
- i. pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- j. pelaksanaan dan penyiapan akuntansi dan laporan keuangan dinas.

- k. penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l. penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

v. Bidang Pertanian dan Perkebunan

Pasal 9 (1) Bidang Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pertanian dan perkebunan serta melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan di bidang pengembangan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
- b. penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan di bidang pengembangan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
- c. pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis di bidang pengembangan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
- d. penyediaan dukungan, bantuan dan kerjasama dibidang pengembangan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
- e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan di bidang pengembangan tanaman pangan tanaman hortikultura, tanaman perkebunan dan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

vi. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan peternakan dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan, pelaksanaan dan perumusan kebijaksanaan umum dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang peternakan.
- b. pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pembinaan umum di bidang peternakan, kesehatan hewan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- c. pengoordinasian, pembinaan dan perumusan bimbingan teknis di bidang peternakan.
- d. pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pemberian izin dan pembinaan usaha di bidang peternakan.
- e. pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pengawasan teknis usaha di bidang peternakan.
- f. pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- g. perumusan dan penyusunan laporan evaluasi tahunan dan laporan evaluasi lima tahunan di bidang peternakan.
- h. pengoordinasian, pembinaan, perumusan dan penyusunan rencana kerja tahunan dan lima tahunan di bidang peternakan.
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

vii. Bidang Perikanan

Mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perikanan dan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan serta peningkatan usaha budidaya.
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan serta peningkatan usaha budidaya.
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan serta peningkatan usaha budidaya.

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan serta peningkatan usaha budidaya.
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan serta peningkatan usaha budidaya.
- f. perumusan kebijakan dibidang pengelolaan sumber daya ikan, standarisasi armada perikanan dan alat penangkapan ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan.
- g. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standarisasi armada perikanan dan alat penangkapan ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan.
- h. pengelolaan sumberdaya ikan, standarisasi armada perikanan dan alat penangkapan ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan.
- i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumberdaya ikan, standarisasi armada perikanan dan alat penangkapan ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan.
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumberdaya ikan, standarisasi armada perikanan dan alat penangkapan ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan dan kenelayanan.
- k. perumusan kebijakan dibidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan, peningkatan sistem logistik produk perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan.
- l. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan, peningkatan sistem logistik produk perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan.
- m. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan, peningkatan sistem logistik produk perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan.
- m. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan.
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan, peningkatan sistem logistik produk perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha perikanan.
- o. pelaksanaan pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan.

- p. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan bidang perikanan.
- q. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan bidang perikanan.
- r. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan bidang perikanan.
- s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT sebagaimana dimaksud pada dapat dibedakan dalam 2 klasifikasi, yakni : a. UPT kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar; b. UPT kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil. Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Serta Jenis jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D.Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

V i s i

Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik merupakan persyaratan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita setiap warga negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pendayagunaan Aparatur Daerah dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi daerah yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan memperaktekkan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Dengan berpedoman kepada Tata Pemerintahan yang baik maka diperlukan lembaga pemerintahan yang profesional serta mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya visi yang merupakan cara pandang kedepan kemana dan bagaimana arah pembangunan untuk dilaksanakan. Demikian juga Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru agar tetap konsisten dapat eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif, perlu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yang sesuai dengan Visi serta misinya.

Dengan berpedoman kepada renstra Dinas Pertanian Kota Pekanbaru Tahun 2017 –2022 yang telah dirangkum dan disepakati bersama, Visi Dinas Pertanian Kota Pekanbaru sebagai berikut: “Terwujudnya-sentra sentra Agribisnis di Kota Pekanbaru yang mampu meningkatkan ketersediaan protein Nabati dan

Hewani serta Kawasan Terbuka Hijau sekaligus meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Petani yang Madani”.

Misi

Misi adalah suatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Pekanbaru sesuai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi yang telah dirumuskan oleh Dinas Pertanian Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sentra-sentra produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan.
2. Meningkatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang ramah lingkungan.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
4. Meningkatkan Sistem Agribisnis dan Kualitas Pelayanan Usaha Tani.
5. Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau serta Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Pelaksanaan penelitian Strategi Dinas Pertanian dan Perikanan dalam mengembangkan Sektor Pertanian melakukan penyebaran Kuissioner, wawancara, maka yang harus dipenuhi ialah berupa identitas informan tersebut. Informan pada penelitian ini mempunyai tingkat pendidikan, kelompok umur yang berbeda beda. Hal ini bisa dilihat dari pada tabel berikut:

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang dalam penyerapan teknologi ataupun inovasi baru dalam bidang pertanian, Apabila tingkat pendidikan rendah akan menyebabkan lambatnya daya serap petani terhadap perkembangan teknologi sehingga terjadi kesulitan dan butuh waktu yang lama agar memahami inovasi yang lebih baru. Sebaliknya apabila seseorang dengan pendidikan tinggi cenderung mudah menerima suatu perubahan untuk perbaikan usaha tani yang lebih baik, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel klasifikasi informan dibawah ini:

Tabel IV.1 Klasifikasi Informan Penelitian Strategi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase(%)
1	SD	3	7%
2	SMP	7	18%
3	SMA	15	37%

1	2	3	4
4	Diploma	4	10%
5	Sarjana	8	20%
6	Pasca Sarjana	3	8%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan pada Klasifikasi diatas diketahui bahwa sebanyak 3 informan berada pada tingkat pendidikan atau lulusan SD, 7 informan adalah lulusan SMP, sebanyak 15 informan lulusan SMA, Diploma sebanyak 4 informan , lulusan sarjana sebanyak 8 informan dan pada lulusan pasca sarjana yaitu sebanyak 3 informan. Dengan demikian sebagian besar informan berpendidikan SMA. Sudarta (2002) menyampaikan bahwa pengetahuan petani membantu dan menunjang kemampuannya untuk menyerap teknologi dalam usaha taninya dan kelangsungan usaha tani. Semakin tinggi tingkat pengetahuan petani maka kemampuannya dalam menyerap atau memahami teknologi dibidang pertanian juga tinggi, demikian pula sebaliknya.

2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin dalam sebuah penelitian tidaklah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruh jenis kelamin informan pada hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah. Pengklasifikasian berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.2 Klasifikasi Informan Penelitian Strategi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase(%)
1	Laki-laki	31	78%
2	Perempuan	9	22%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada informan penelitian Laki-laki sebanyak 31 dan pada informan penelitian Perempuan adalah sebanyak 9 orang informan.

3. Tingkat Umur Informan

Selanjutnya responden di klasifikasikan berdasarkan kepada umur dan dapat dilihat pada tabel klasifikasi dibawah ini :

Tabel V.1 Klasifikasi Informan Penelitian Strategi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru berdasarkan Umur.

No	Umur	Jumlah	Persentase(%)
1	≤25 tahun	8	20%
2	25-39 tahun	19	48%
3	40-49 tahun	11	27%
4	≥ 50 tahun	2	5%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2020

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa informan terbesar adalah pada rentang umur 25-39 tahun dengan jumlah informan sebanyak 19

orang, pada rentan umur 25-39 tahun manusia masih dikatakan usia produktif dan aktif dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan. Selanjutnya pada usia ≤ 25 tahun sebanyak 8 orang, pada usia 40-49 tahun sebanyak 11 informan dan selebihnya yaitu pada usia ≥ 50 tahun berjumlah 2 orang dari keseluruhan informan.

B. Strategi Dinas Pertanian dan Perikanan dalam Mengembangkan Sektor Pertanian

Strategi di definisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang, yang didalamnya terdapat seni serta pengetahuan untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan yang akan membuat seseorang atau suatu organisasi mencapai hasil atau tujuan yang di inginkan. Mengembangkan sektor pertanian berarti turut mengembangkan pembangunan nasional. Otonomi daerah hadir agar pembangunan nasional cepat mendapat respon dari yang berwenang, Menurut Mardismo Otonomi daerah merupakan pemindahan kebutuhan besar kewenangan yang semula berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Misi utama otonomi daerah sendiri adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, dan memberdayakan serta menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Mardismo, 2002 : 59).

Maka Dengan adanya otonomi daerah maka pembangunan nasional berkembang merata di masing masing daerah yang di dalamnya terdapat beberapa sektor termasuk Sektor Pertanian. Sektor pertanian yang kuat dapat pula diartikan sebagai syarat perlu bagi keberhasilan dari perubahan perekonomian menuju ke industrialisasi terutama pada negara berkembang. Negara agar menuju ke industrialisasi terutama pada negara berkembang sektor pertanian merupakan salah satu sektor wajib yang harus dikembangkan. Seiring dengan usaha-usaha pembangunan pertanian, muncul masalah-masalah baru yang kemudian memperlambat laju perkembangan pertanian di Indonesia. Mulai dari kerusakan alam yang diakibatkan oleh pelaku produksi dan konsumen pertanian sampai minimnya pendidikan petani. Hal ini disebabkan adanya pola hidup yang berubah dari petani itu sendiri, minimnya pengetahuan akan pemanfaatan dan pengembangan pertanian modern, politik pertanian serta pudarnya nilai-nilai budaya dan spirit yang dimiliki oleh pelaku pertanian. Belum lagi masalah adanya pertentangan antara pertanian modern dengan pertanian berkelanjutan yang semestinya dapat dikombinasikan dalam sistem pertanian terpadu, kepemilikan hak paten atas produk pertanian asli Indoneia yang tak dimiliki lagi oleh bangsa kita dan segelintir masalah-masalah lainnya. Untuk itu salah satu cara mengembangkan sektor pertanian adalah dengan menetapkan strategi.

Untuk mengetahui strategi apa saja dan indikator indikator dalam dalam mengembangkan Sektor Pertanian dikota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Organisasi

Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan Organisasi adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah agar mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan,serta cara bertindak, sedangkan kebijakan pertanian menjelaskan serangkaian hukum terkait pertanian serta hasil pertanian nya agar mencapai tujuan tertentu. Kebijakan Organisasi merupakan garis besar atau pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi agar mencapai sasaran suatu Organisasi tersebut.

Menurut Akdon(2011:277) Kebijakan organisasi mempunyai beberapa item penilaian yaitu Penetapan program, Program bentuk Pengembangan, serta Pencapaian hasil program pengembangan.

a. Penetapan Program

Tujuan Penyusunan serta penetapan Program secara umum dapat diartikan sebagai untuk mengetahui secara rinci tindakan-tindakan yang harus dilakukan agar tujuan, kewajiban, dan sasaran pengembangan dapat dicapai.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Ir. H Syahmanar. S.Umar, MM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan tentang Penetapan Program pada 26 Desember 2019, pukul 10.00 WIB .

“Program yang telah dibuat akan dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan kepada petani di Kecamatan-Kecamatan yang tergabung dalam gapoktan atau gabungan kelompok tani yang nantinya materi pelatihannya kami sesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi masing-masing kecamatan, namun kami ajarkan juga kepada petani tentang bagaimana cara mengolah tanah, strategi irigasi yang baik, cara pemupukan yang efektif, dan penanggulangan hama dan gulma secara preventif serta tetap mampu menjaga lingkungan.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ir. Hj. Darwamati Manap selaku Bidang Pertanian dan Perikanan.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Ibu Ir. Hj. Darwamati Manap selaku Bidang Pertanian dan Perikanan pada 26 Desember 2019, pukul 14.00 WIB.

Beliau mengatakan “Penetapan program pertanian ini dimaksudkan agar apa yang menjadi visi dan misi Dinas Pertanian dan Perikanan yaitu untuk mengembangkan sektor pertanian berjalan sesuai yang diinginkan, serta melihat Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru agar tetap antisipatif dan inovatif serta produktif, perlu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru maka dibentuklah kebijakan pertanian yang terdiri beberapa program program tersebut,”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas dengan Kepala bidang Pertanian dan Perikanan maka peneliti mengetahui bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru 113 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) dimana bagian a di jelaskan bahwa kepala dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan perikanan dengan menetapkan beberapa program.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Ibu Sri Alam, Sp,M.Si, selaku Seksi Holtikultura pada tanggal 26 Desember 2019, pukul 15.00 WIB.

Beliau mengatakan “Program-program ini dibentuk setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dilaksanakan oleh bidang-bidang yang telah ditentukan”

Berdasarkan kutipan wawancara di atas maka dapat dianalisis pelaksanaan kebijakan diberikan kepada bidang-bidang yang memiliki tugas serta fungsi masing masing untuk melaksanakan kebijakan.

Berikut kutipan wawancara bersama Bapak Amril selaku Ketua Kelompok Tani pada tanggal 03 Januari 2020, pukul 11.00 WIB.

“Jika penetapan program sejauh ini dikatakan sudah bagus, dengan diberikannya bantuan sesuai yang dibutuhkan petani, apalagi petani terkadang tidak mampu membeli sendiri alat pertaniannya, jadi dilakukan dengan manual dikarnakan tidak ada alat pertanian, tetapi jika diberikan bantuan maka sangat membantu sekali”

Berdasarkan kutipan wawancara bersama Bapak Amril di atas dianalisis bahwa petani sudah sangat terbantu dengan penetapan program yang dilakukan Dinas pertanian dan Perikanan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Ujang Tanjung pada tanggal 03 Januari 2020, pukul 16.00 WIB.

“Sebagai petani tentu sangat mendukung adanya program ini dikarenakan dengan adanya program ini dengan memberikan bantuan kepada petani maka petani lebih terbantu untuk mengelola dan memproduksi hasil pertanian kami sendiri”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa masyarakat mendukung kebijakan ini dikarnakan dengan kebijakan yang telah ditetapkan para petani terbantu dengan adanya bantuan yang telah diberikan.

Dari observasi yang dilakukan peneliti dilapangan Dinas Pertanian dan Perikanan telah menetapkan beberapa program demi mendukung hasil pertanian petani, salah satu penetapan program tersebut berkaitan dengan diberikannya alat bantuan pertanian atau alsintan untuk memudahkan petani dalam mengelola pertanian yang mereka kerjakan.

b. Program Bentuk Pengembangan

Untuk mengembangkan sektor pertanian maka dibentuk beberapa program pengembangan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk itu peneliti melakukan wawancara terkait Program bentuk Pengembangan ini kepada Kepala Dinas Pertanian.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Ir. H Syahmanar. S.Umar, MM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan tentang Program bentuk pengembangan pada 26 Desember 2019, pukul 10.00 WIB .

“Dinas memberikan program yang berupa bantuan sesuai dengan kebutuhan petani, jika petani tidak mempunyai mesin pompa buat pertaniannya, Pegawai Dinas akan mendata sesuai dengan ketentuan, yang nantinya akan kami berikan bantuan”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ir. Hj. Darwamati Manap selaku Bidang Pertanian dan Perikanan.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Ibu Ir. Hj. Darwamati Manap selaku Bidang Pertanian dan Perikanan pada 26 Desember 2019, pukul 14.00 WIB.

Beliau mengatakan “Kami memberikan alsintan, atau alat mesin pertanian, seperti traktor, cultivator dan sebagainya, yang nanti alat inilah yang membantu mereka dalam pengembangan pertanian nanti petani”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas dengan Kepala Pertanian dan Perikanan maka peneliti mengetahui bahwa program bentuk pengembangan pertanian berupa alsintan(alat mesin pertanian) telah diberikan kepada kelompok tani.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Ibu Sri Alam, Sp,M.Si, selaku Seksi Holtikultura pada tanggal 26 Desember 2019, pukul 15.00 WIB.

Beliau mengatakan “Program bentuk pengembangan pertaniannya dengan Dinas ikut serta membangun pertanian yang baik bagi petani dengan memberikan fasilitasi bagi mereka, bahkan bibit kita pun akan diberikan jika petani membutuhkan bibit”

Berdasarkan kutipan wawancara di atas maka dapat dianalisis pengembangan telah difasilitasi untuk mengembangkan pertanian para petani.

Berikut kutipan wawancara bersama Bapak Amril selaku Ketua Kelompok Tani pada tanggal 03 Januari 2020, pukul 11.00 WIB.

“Jika bentuk dari program diberikannya fasilitas, ya para petani diberikan fasilitas oleh pegawai Dinas pertanian, seperti cultivator yang sudah ada sekarang ini untuk digunakan bersama”

Berdasarkan kutipan wawancara bersama Bapak Amril di atas dianalisis bahwa pegawai Dinas pertanian dan perikanan telah memfasilitasi pengembangan pertanian dengan memberikan bantuan alat pertanian.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Ujang Tanjung pada tanggal 03 Januari 2020, pukul 16.00 WIB.

“Petani sudah diberikan fasilitas untuk lebih mengembangkan pertanian yang lebih maju, serta telah diberikan macam macam bibit sesuai kebutuhan”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa masyarakat yang sedang bertani telah mendapatkan bantuan dari program pengembangan terhadap pertanian masyarakat .

Dari observasi yang dilakukan peneliti dilapangan Dinas Pertanian dan perikanan telah memberikan fasilitas sebagai bentuk program pengembangan pertanian yang dilakukan petani.

c. Pencapaian Hasil Program Pengembangan

Pencapaian Hasil dari bentuk program pertanian juga meningkatkan produksi pertanian yang turut berdampak kepada masyarakat akan kebutuhan pangannya. Berikut ini peneliti melakukan wawancara terkait Pencapaian Hasil Program Pengembangan kepada Kepala Dinas Pertanian

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Ir. H Syahmanar. S.Umar, MM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan tentang Pencapaian Hasil Program Pengembangan pada 26 Desember 2019, pukul 10.00 WIB .

“Jika hasil sudah pasti setiap program yang dilakukan menginginkan hasil yang baik, tidak bisa kami memastikan hasilnya bisa bagus apabila diberikan program, tetapi kami membantu petani dengan memfasilitasi pertanian mereka agar petani lebih termotivasi meningkatkan pertaniannya”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ir. Hj. Darwamati Manap selaku Bidang Pertanian dan Perikanan.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Ibu Ir. Hj. Darwamati Manap selaku Bidang Pertanian dan Perikanan pada bulan 26 Desember 2019 , pukul 14.00 WIB.

Beliau mengatakan “Jika hasil pengembangan dikatakan sudah bagus, yang tahun lalu cabe dikatakan menurun, tahun ini diberikan bantuan program mulai berangsur meningkat hasil produksinya”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas dengan Kepala Pertanian dan Perikanan maka peneliti mengetahui peningkatan produksi mulai meningkat pertahunnya.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Ibu Sri Alam, Sp,M.Si, selaku Seksi Holtikultura pada tanggal 26 Desember 2019, pukul 15.00 WIB.

Beliau mengatakan “Pencapaian hasil program pengembangan pertanian sudah bagus sejauh ini”

Berdasarkan kutipan wawancara di atas maka dapat dianalisis pencapaian hasil program pengembangan pertanian sudah bagus .

Berikut kutipan wawancara bersama Bapak Amril selaku Ketua Kelompok Tani pada tanggal 03 Januari 2020, pukul 11.00 WIB.

“Jika bertanya tentang hasil produksi memang tahun lalu menurun dan tahun ini ada peningkatan meskipun sedikit, dan peningkatan ini sedikit banyaknya pengaruh dari program yang sudah diterapkan kepada pertanian yang petani kerjakan”

Berdasarkan kutipan wawancara bersama Bapak Amril di atas dianalisis bahwa tahun ini produksi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Ujang Tanjung pada tanggal 03 Januari 2020, pukul 16.00 WIB.

“Hasilnya terkadang mengalami peningkatan dan terkadang mengalami penurunan, cuaca pun juga bisa membuat petani jadi repot dikarnakan akan mengganggu produksi pertanian juga”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa pencapaian hasil program pengembangan pun dapat menurun dikarnakan iklim yang berubah ubah sehingga mengganggu produksi pertanian.

Berikut dijabarkan program yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan pada tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2016.

Tabel V.2 Data Peningkatan Hasil Produksi Pertanian di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Bawang Merah		Cabai Merah		Terung	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	Tampan	515 kg	567 kg	955 kg	953 kg	-	6 ton
2	Marpoyan Damai	448 kg	-	874 kg	924 kg	2,3 ton	3 ton
3	Rumbai	723 kg	804 kg	1,31 ton	1.4 ton	-	3 ton

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2020

Maka dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa item penilaian dari indikator Kebijakan Organisasi Penetapan program, Program bentuk Pengembangan pertanian telah diterapkan serta pencapaian hasil program pengembangan pertanian dapat dikatakan baik.

Dari observasi yang dilakukan penulis dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas pertanian dan Perikanan menetapkan beberapa program untuk pengembangan sektor pertanian, program bentuk pengembangan yaitu untuk peningkatan produksi pertanian dan nilai tambah hortikultura, pencapaian dari hasil program dikatakan cukup baik karna mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan dilapangan peneliti menemukan: *Pertama*, Penetapan program yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perikanan sudah diterapkan dengan baik. *Kedua*, Program bentuk dari pengembangan pertanian telah dijabarkan dan diberikan sesuai dengan bantuan pemerintah kepada kelompok tani untuk mengembangkan pertaniannya. *Ketiga*, Pencapaian Hasil Program Pengembangan pertanian dikatakan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

2. Memotivasi Pegawai

Menurut Munandar (2004) Memotivasi Pegawai adalah “suatu proses dimana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan tertentu. Motivasi dapat diartikan juga sebagai suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi juga dapat didefinisikan sebagai semua hal yang menimbulkan dorongan atau semangat di dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Memotivasi pegawai berarti memberikan dorongan kepada pegawai atau pekerja untuk melakukan sesuatu sehingga memunculkan semangat bekerja dalam dirinya. Motivasi Pegawai pertanian dalam bekerja yang dirasakan karyawan akan membuat mereka merasa semangat serta menimbulkan dorongan agar kegiatan mereka terlaksana dengan baik sesuai tujuan yang ingin dicapai pada Pertanian tersebut .

Menurut Akdon(2011:277) Memotivasi Pegawai mempunyai beberapa item penilaian yaitu Bentuk Pemberian Pelatihan bagi Kelompok Tani, Bentuk Pengembangan Pertanian, Kegiatan pertanian dari penanaman sampai panen.

a. Pemberian Pelatihan dari Pegawai untuk memotivasi Kelompok Tani.

Pemberian pelatihan terhadap petani maupun kelompok tani tidak hanya mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani tetapi kegiatan pelatihan juga mempengaruhi sikap dan motivasi petani untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok tani. Bahkan mempraktikkan pengetahuan yang didapat di lapangan.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Ir. H Syahmanar. S.Umar, MM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan pada 26 Desember 2019, pukul 10.00 WIB.

”Pelatihan yang kami berikan kepada petani ada dua pelatihan yaitu pelayanan fisik dan pelayanan non fisik. Pelayanan fisik yaitu pelayanan dengan memberikan alat-alat pertanian kepada petani untuk membantu pekerjaan mereka dalam bekerja. Kemudian pelayanan non-fisik yaitu dengan menempatkan penyuluh di masing-masing gapoktan di kecamatan-kecamatan untuk melatih para petani dalam bertani. Disini kesempatan para petani untuk belajar cara bertani yang baik dan benar serta tempat petani untuk bisa menyampaikan keluhan- keluhannya.”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dianalisis bahwa para petani yang tergabung dalam gapoktan diberikan pelatihan, yaitu pelayanan fisik dan non fisik dimasing masing kecamatan.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Ibu Ir. Hj. Darwamati Manap selaku Bidang Pertanian dan Perikanan pada bulan 26 Desember 2019, pukul 14.00 WIB

“Pemberian pelatihan bagi kelompok tani sudah dilakukan sesuai bidang masing masing sesuai dengan peraturan yang berlaku, kelompok tani diberikan pelatihan dan penyuluhan pertanian yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan para petani tersebut”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dianalisis bahwa para petani yang tergabung dalam kelompok tani sudah diberikan pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan petani.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Ibu Sri Alam, Sp,M.Si, selaku Seksi Holtikultura pada tanggal 26 Desember 2019, pukul 15.00 WIB.

Beliau mengatakan “Pelatihan pertanian ini terbagi menjadi beberapa jenis, contohnya petani kita berikan contoh pemanfaatan teknologi digital, Pelatihan penggunaan alat pertanian, Pengelolaan hasil pertanian, tentu hal inilah jika kita berikan pelatihan terus menerus akan memberi

motivasi bagi petani tersebut untuk lebih mengembangkan pertanian karna sudah mengetahui cara cara bagaimana mengelola pertaniannya”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa pelatihan dan penyuluhan telah diberikan kepada petani mulai dari pemanfaatan teknologi digital, pelatihan penggunaan alat pertanian, pengelolaan hasil pertanian yang akan membantu memotivasi petani.

Berikut kutipan wawancara bersama Bapak Amril selaku Ketua Kelompok Tani pada tanggal 03 Januari, pukul 11.00 WIB.

“Sebagai petani, pemerintah sudah sangat bagus dalam melayani petani. Alat bertani yang petani pakai buat bertani di berikan oleh pemerintah. dan Dinas pun melakukan penyuluhan terhadap pertanian kami. jadi, jika petani punya masalah pertanian maka petani disuruh untuk menyampaikan keluhan kepada Gapoktan, dan nanti keluhan-keluhan petani tersebut akan disampaikan pada saat penyuluhan”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa petani telah mendapat penyuluhan yang tepat sesuai keluhan keluhan yang ada.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Ujang Tanjung pada tanggal 03 Januari 2020, pukul 16.00 WIB.

“Memang benar diberikan pelatihan dan penyuluhan kepada petani, tetapi tidak semua petani mengerti dengan penyuluhan tersebut, dan petani juga dipusingkan menggunakan alat alat pertanian yang baru, jadi sebagian petani masih nyaman menggunakan alat pertanian lama mereka”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa petani hanya diberikan pelatihan dengan beberapa alat mesin pertanian, sehingga mereka masih dipusingkan menggunakan alat yang lainnya.

Dari observasi yang dilakukan penulis dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas pertanian dan Perikanan bahwa bentuk dari pelatihan

kepada kelompok tani yaitu melalui penyuluhan telah diadakan kepada petani mulai dari pemanfaatan teknologi digital, pelatihan penggunaan alat pertanian, pengelolaan hasil pertanian .

b. Bentuk Memotivasi dalam pengembangan pertanian

Bentuk pengembangan Pertanian salah satunya dengan menetapkan program yang tepat serta sesuai. Untuk itu peneliti melakukan wawancara terkait Bentuk Pengembangan ini kepada Kepala Dinas Pertanian.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Ir. H Syahmanar. S.Umar, MM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan pada 26 Desember 2019, pukul 10.00 WIB.

”Seperti yang sudah dijelaskan bahwa salah satunya tentu dengan program yang telah dijalankan, pelatihan, penyuluhan, yang nantinya mereka terapkan hasil dari penyuluhan tersebut ke pertanian mereka”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dianalisis bentuk pengembangan pertanian adalah salah satunya dengan penetapan program.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Ibu Ir. Hj. Darwamati Manap selaku Bidang Pertanian dan Perikanan pada 26 Desember 2019, pukul 14.00 WIB

“Bentuk memotivasi pengembangan pertanian, sebagaimana disebutkan petani diberikan fasilitas fasilitas untuk mendukung pertanian yang mereka kerjakan, yang fasilitas tersebut juga terdapat dalam program Dinas pertanian dan perikanan Kota Pekanbaru”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dianalisis bentuk memotivasi petani dalam pengembangan pertanian dengan diberikannya fasilitas fasilitas kepada kelompok tani.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Ibu Sri Alam, Sp.M.Si, selaku Seksi Holtikultura pada tanggal 26 Desember 2019, pukul 15.00 WIB.

Beliau mengatakan “Kami memberikan bantuan bantuan dalam bentuk program adalah salah satunya untuk memotivasi mereka juga dengan memfasilitasi pengembangan kawasan bawang merah sekitar 8 ha atau ada juga cabe merah sekitar 23 Ha”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa bentuk memotivasi pengembangan pertanian adalah salah satunya dengan memfasilitasi para petani untuk mengembangkan pertanian mereka.

Berikut kutipan wawancara bersama Bapak Amril selaku Ketua Kelompok Tani pada tanggal 03 Januari 2020, pukul 11.00 WIB.

“Kami telah diberikan alat alat pertanian yang berguna sekali, petani juga dibuatkan sumur bor untuk memudahkan mereka”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa bentuk dari pengembangan pertanian berupa alat mesin pertanian yang telah diberikan kepada petani.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Ujang Tanjung pada tanggal 03 Januari 2020, pukul 16.00 WIB.

“Bentuk nyata Dinas pertanian dan perikanan memang memberikan dan membantu petani seperti pompa air yang diberikan oleh pegawai Dinas”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa telah diberikannya bantuan program sebagai bentuk pengembangan pertanian.

Berikut adalah Kegiatan serta Bentuk program yang telah diberikan kepada kelompok tani dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru:

Tabel VI.1 Kegiatan Serta Bantuan dari Dinas kepada Kelompok Tani di Kota Pekanbaru

No	Kegiatan	Pemberian Kepada Kelompok Tani
1	Fasilitasi Pengembangan pemberian bibit pertanian dengan ketetapan Kawasan Bawang Merah 8 ha, Cabai Merah 23 ha, Terung 14 ha.	a. Pemberian bibit Cabe Merah b. Pemberian bibit Bawang Merah c. Pemberian bibit Terung
2	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (Belanja barang dan diserahkan kepada Kelompok Tani)	a. Pengadaan Sumur Bor Pengadaan Mesin Pompa Air
3	(Bantuan dalam bentuk barang) Bantuan alsintan (alat mesin pertanian) kepada kelompok tani.	- 11 unit Cultivator - 20 unit handsprayer - 1 unit koonseed - 5 unit pompa air - 6 unit traktor roda 2

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2020

Dari observasi yang dilakukan penulis dilapangan Bentuk dari Memotivasi dalam pengembangan pertanian yaitu pegawai Dinas pertanian dan perikanan Kota Pekanbaru memberikan pelatihan, penyuluhan kepada petani sebagai bentuk dari memotivasi kelompok tani dikarenakan pelatihan yang diberikan dapat menambah wawasan bagi kelompok tani untuk lebih mengembangkan dan pengelola pertanian mereka.

c. Kegiatan pertanian dari penanaman sampai panen

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Ir. H Syahmanar. S.Umar, MM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan pada bulan 26 Desember 2019, pukul 10.00 WIB.

”Kegiatan yang dilakukan seperti Penyuluhan pertanian merupakan mekanisme penting menyampaikan informasi dan petunjuk serta masukan dalam pertanian mereka, hal tersebut juga sebagai kegiatan pendidikan non formal yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang dan masalah-masalah pertanian”.

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dianalisis bahwa para petani diberikan penyuluhan mengenai informasi serta petunjuk dan juga sebagai pendidikan non formal.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Ibu Ir. Hj. Darwamati Manap selaku Bidang Pertanian dan Perikanan pada bulan 26 Desember 2019, pukul 14.00 WIB

“Kegiatan pegawai seperti pegawai atau penyuluh terjun ke lapang untuk melakukan survei dan melakukan pengamatan tentang kondisi pertanian di suatu kecamatan tersebut. Kemudian akan didapat informasi tentang masalah yang sedang dihadapi dalam masa penanaman sampai panen tersebut”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dianalisis bahwa para pegawai turun kelapangan untuk mensurvei serta melakukan pengamatan tentang kondisi pertanian.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Ibu Sri Alam, Sp,M.Si, selaku Seksi Holtikultura pada tanggal 26 Desember 2019, pukul 15.00 WIB.

Beliau mengatakan “Kami memberikan penyuluhan, penyuluhan tersebut tidak hanya memberikan materi tentang pertanian, tetapi juga mengajarkan petani bagaimana menggunakan alat pertanian yang modern agar lebih efektif dan efisien”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa pelatihan dan penyuluhan mengajarkan petani menggunakan alsintan yang telah diberikan agar lebih efektif serta efisien.

Berikut kutipan wawancara bersama Bapak Makmur selaku Ketua Kelompok Tani pada tanggal 03 Januari 2020, pukul 11.00 WIB.

“Kegiatan penyuluhan ini sebenarnya memiliki banyak manfaat bagi petani, salah satunya memiliki tujuan yaitu menumbuhkan perubahan-perubahan dalam diri petani yang mencakup tingkat pengetahuan, kecakapan, kemampuan, sikap, dan motivasi terhadap kegiatan usaha tani yang dilakukan”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa petani telah mendapat penyuluh agar memberikan motivasi terhadap usaha tani yang dilakukan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Ujang Tanjung pada tanggal 03 Januari 2020, pukul 16.00 WIB.

“Kegiatan pertanian yang diberikan seperti pelatihan dan penyuluhan kepada petani, bagaimana mengatasi masalah saat hama atau penanggulangan seperti gagal panen, meskipun begitu petani masih suka takut akan kegagalan panen jika disuruh tanam bibit yang rentan yang seperti cabe yang rentan terhadap iklim”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa pegawai memberikan pelatihan bagaimana mengatasi masalah ketika penanaman awal serta penanggulangan saat panen seperti kegagalan saat panen.

Berikut data tentang bentuk dan kegiatan pengembangan pertanian yang di Dinas Pertanian dan Perikanan yang telah dilaksanakan untuk kelompok tani.

Tabel VI.2 : Bentuk dan Kegiatan Pengembangan Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

No	Bentuk Pengembangan Pertanian	Kegiatan
1	Program	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Program b. Penetapan Program c. Pelaksanaan Program d. Pengevaluasian Program
2	Pelaksanaan Program	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Irigasi Air Dangkal b. Pengadaan Sumur Bor c. Pengadaan Mesin Pompa Air d. Pemberian Alat Mesin Pertanian
3	Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian Informasi terkait pertanian b. Pemanfaatan teknologi digital c. Pelatihan penggunaan Alat Pertanian d. Pengelolaan hasil pertanian

Sumber:Olahan data Penelitian 2020

Maka dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa item penilaian dari indikator Memotivasi Pegawai yaitu Pemberian pelatihan dari pegawai untuk memotivasi kelompok tani sudah dilakukan, Bentuk Memotivasi dalam Pengembangan pertanian yaitu dengan diberikannya bantuan serta program program yang telah dilaksanakan, Kegiatan pertanian dari penanaman sampai panen telah dilaksanakan pegawai Dinas kepada kelompok tani untuk mengembangkan sektor pertanian melalui penyuluhan.

Dari observasi yang dilakukan penulis dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa pemberian pelatihan dari pegawai untuk memotivasi kelompok tani yaitu dengan memberikan penyuluhan yang terdapat tentang penyampaian informasi terkait pertanian, pemanfaatan teknologi digital, pelatihan penggunaan alat pertanian serta pengelolaan hasil pertanian. Bentuk Memotivasi dalam pengembangan pertanian adalah salah satunya dengan

penetapan serta pelaksanaan dari program. Kegiatan pertanian dari penanaman sampai panen terdapat pelatihan yang salah satunya bertujuan untuk bagaimana mengatasi masalah ketika penanaman awal serta penanggulangan saat panen seperti kegagalan saat panen.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi penelitian yang dilakukan dilapangan peneliti menemukan: *Pertama*, Pemberian Pelatihan dari Pegawai untuk Memotivasi Kelompok tani yaitu Dinas Pertanian dan perikanan melakukan pelatihan pertanian yang terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu dengan memberikan contoh pemanfaatan teknologi digital, pelatihan penggunaan alat pertanian, pengelolaan hasil pertanian serta memberikan alat-alat pertanian kepada petani. *Kedua*, Bentuk Memotivasi dalam pengembangan pertanian salah satunya yaitu Dinas memberikan fasilitas untuk pengembangan pertanian dengan membangun irigasi air dangkal, pemberian bantuan dalam bentuk barang, serta pemberian bibit. Tetapi peneliti menemukan bahwa pemberian bantuan yang diberikan kepada kelompok tani belum secara merata terlaksana, hanya sebagian kelompok tani yang benar benar mendapatkan bantuan. *Ketiga*,. Kegiatan pertanian dari penanaman sampai panen yaitu pegawai atau penyuluh terjun ke lapangan untuk melakukan survei dan melakukan pengamatan tentang kondisi pertanian di suatu kecamatan tersebut. Untuk memperoleh informasi tentang masalah yang sedang dihadapi dalam masa penanaman sampai panen serta melakukan pembinaan terhadap kelompok tani . Tetapi peneliti menemukan bahwa belum maksimalnya pembinaan kelompok tani sehingga petani masih merasa takut kegagalan panen.

3. Alokasi Sumber Daya

Rees (1990) mengatakan bahwa Alokasi sumber daya adalah penyerahan sumber daya yang tersedia untuk berbagai penggunaan. Alokasi Sumber Daya juga merupakan penyaluran atau distribusi sumber daya (yang biasanya berupa keuangan) antara kelompok yang bersaing orang atau program. Sumber daya dapat dikatakan sebagai sumber daya haruslah memiliki dua kriteria yang pertama yaitu harus ada pengetahuan, teknologi atau keterampilan (skill) untuk memanfaatkannya yang kedua adalah harus ada permintaan (demand) terhadap sumber daya tersebut (Fauzi, 2004).

Menurut Akdon(2011:277) Alokasi Sumber Daya mempunyai beberapa item penilaian yaitu Kemampuan Pegawai didalam Pengembangan pertanian, Kerjasama dengan masyarakat dalam pengembangan pertanian, Melakukan evaluasi akan hasil pertanian.

a. Kemampuan Pegawai didalam Pengalokasian Sumber Daya.

Kemampuan atau *ability* dapat diartikan sebagai suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, kemampuan pegawai di dalam pengembangan pertanian memiliki arti bahwa pegawai harus memiliki suatu kapasitas didalam setiap individu untuk mengembangkan sektor pertanian. Alokasi Sumber Daya adalah penyaluran atau distribusi sumber daya (biasanya keuangan) antara kelompok yang bersaing orang atau program..Untuk itu peneliti melakukan wawancara terkait kemampuan suatu individu di dalam Pengalokasian Sumber Daya.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Ir. H Syahmanar. S.Umar, MM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan pada 26 Desember 2019, pukul 10.00 WIB.

“Seperti kita tahu, sumber daya yang kami miliki pasti terbatas, baik itu berupa dana, asset, maupun sumber daya manusia. Untuk itu, Dinas Pertanian dan Perikanan perlu melakukan suatu strategi pengalokasian secara efektif. Efektif di sini berarti pegawai harus mampu menempatkan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan tujuan yang jelas. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya dimiliki dapat memberikan hasil yang menguntungkan secara nyata”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan perlu melakukan suatu strategi pengalokasian secara efektif sesuai dengan tujuan yang jelas.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Ibu Ir. Hj. Darwamati Manap selaku Bidang Pertanian dan Perikanan pada 26 Desember 2019, pukul 14.00 WIB

““Pegawai Dinas harus Secara tepat dan akurat mendata serta mengalokasikan Sumber Daya yang ada, sumber daya ini baik secara barang maupun tenaga.

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan haruslah bisa secara tepat dan akurat mendata serta mengalokasikan sumber daya yang ada.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Ibu Sri Alam, Sp,M.Si, selaku Seksi Holtikultura pada tanggal 26 Desember 2019, pukul 15.00 WIB.

“Jika proses pengalokasian sumber daya ini berjalan dengan efektif, Dinas perlu menerapkan efisiensi dalam proses pengalokasian sumber daya. Maksudnya, dalam menjalankan strategi, sebisa mungkin harus menekan anggaran pengeluaran atau melakukan strategi itu dalam waktu yang sesingkat mungkin. Dengan demikian, tujuan Dinas dapat tercapai secara efektif dan efisien”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa Pegawai Dinas perlu menerapkan efisiensi dalam proses pengalokasian sumber daya.

Berikut kutipan wawancara bersama Bapak Amril selaku Ketua Kelompok Tani pada tanggal 03 Januari 2020, pukul 11.00 WIB.

“Secara pribadi, pengalokasian sumber daya sudah akurat tepat sasaran bagi para petani”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kota pekanbaru telah secara tepat dalam pengalokasian sumber daya kepada petani.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Ujang Tanjung pada tanggal 07 Juli 2019, pukul 16.00 WIB.

“Kemampuan pegawai pegawai yang telah turun kelapangan untuk mengalokasikan sumber daya di anggap sudah mengerti tentang pertanian atau penyuluhan ini tetapi bapak merasa para petani ini masih dibingungkan cara mengelola hasil pertanian mereka, seharusnya pegawai melakukan pengawasan secara rutin agar hasil pertanian para petani ini tidak menurun, sayang apabila sudah diberikan bantuan berbagai bentuk program, alat pertanian, bibit, tetapi mereka tidak pandai mengolalanya dan menggunakan, jadi tidak terpakai, atau malah nanti disalah gunakan”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kota pekanbaru Harus dapat secara tepat dan akurat dalam pengalokasian sumber daya agar mencapai tujuan yang di inginkan.

Dari observasi yang dilakukan penulis dilapangan dikatakan bahwa pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan melakukan suatu strategi pengalokasian secara efektif. Efektif yaitu pegawai mampu menempatkan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan tujuan yang jelas.

b. Kerjasama dengan masyarakat dalam Pengalokasian Sumber Daya

Kerja sama antar pegawai Dinas pertanian dengan masyarakat dalam program pertanian untuk mengalokasikan sumber daya dilakukan dengan pendataan yang tepat ketika penyuluhan dan pelatihan kepada petani yang dimaksudkan untuk saling menggabungkan kesamaan dan berperan sebagai saling melengkapi dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam proses saling melakukan kerja sama, saling bertukar informasi, memahami cara kerja, sehingga tiap petani mengerti peran yang harus dilakukan dan berkontribusi secara efektif dalam program pengembangan pertanian.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Ir. H Syahmanar. S.Umar, MM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan pada 26 Desember 2019, pukul 10.00 WIB.

”Jika dikatakan melakukan kerjasama antara pegawai dengan masyarakat atau para kelompok tani, maka dapat dikatakan mereka melakukan kerjasama dengan baik, dikarenakan pengalokasian sumber daya inipun dilakukan dan didata untuk mereka juga, diberikannya fasilitas, barang dan dialokasikan kepada petani sesuai kebutuhan sebagai bentuk memotivasi mereka dalam pengelolaan hasil tani”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka Dinas pertanian dan perikanan telah melakukan kerja sama dalam pengalokasian sumber daya.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Ibu Ir. Hj. Darwamati Manap selaku Bidang Pertanian dan Perikanan pada bulan 26 Desember 2019, pukul 14.00 WIB

“”Pegawai penyuluh memang memiliki tugas untuk membantu petani serta mengalokasikan sumber daya bagi mereka secara tepat , dan melakukan kerjasama dengan masyarakat melalui pelatihan tentang cara

mengolah produksi pertanian petani, mengurus masalah yang ada, dan saling melakukan kerjasama”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dianalisis bahwa pegawai melakukan kerja sama serta turun kelapangan untuk membantu petani.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Ibu Sri Alam, Sp,M.Si, selaku Seksi Holtikultura pada tanggal 26 Desember 2019, pukul 15.00 WIB.

Beliau mengatakan “Dalam penyuluhan serta untuk mengalokasikan sumber daya dalam bentuk barang tetap melakukan kerja sama untuk hasil maksimal terhadap dimana serta kapan pengalokasian yang tepat akan dilakukan.

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa pegawai melakukan kerja sama yang baik untuk hasil yang maksimal didalam pengalokasian sumber daya yang tepat.

Berikut kutipan wawancara bersama Bapak Amril selaku Ketua Kelompok Tani pada tanggal 03 Januari 2020, pukul 11.00 WIB.

“Kalau kerja sama dalam mengalokasikan sumber daya dikatakan sudah baik, dengan memberikan alat serta barang yang tepat sesuai kebutuhan”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa petani cukup melakukan kerja sama dengan pegawai.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak Ujang Tanjung pada tanggal 03 Januari 2020, pukul 16.00 WIB.

“Ya harus melakukan kerja sama, serta berkomunikasi apabila ada sesuatu, mereka membantu kami para petani, seperti mereka memberikan bibit, semprotan hama, merekaapun melakukan tugasnya untuk melaksanakan program dan menjalankannya”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa petani serta pegawai saling melakukan kerja sama.

Dari observasi yang dilakukan penulis dilapangan pegawai Dinas pertanian dan perikanan cukup melakukan kerjasama dengan petani untuk mengembangkan pertanian.

c. Melakukan evaluasi akan hasil pertanian

Evaluasi pertanian dilakukan dengan proses pengumpulan data, penentuan ukuran, penilaian serta perumusan keputusan yang digunakan untuk perbaikan atau penyempurnaan perencanaan berikutnya yang lebih lanjut demi tercapainya tujuan dari program pengembangan pertanian.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Ir. H Syahmanar. S.Umar, MM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan pada 26 Desember 2019, pukul 10.00 WIB.

“Tentu diadakan evaluasi, makanya terbentuk program ini hasil dari evaluasi Dinas pertanian terhadap hasil produksi pertanian para kelompok tani ini, kenapa mengalami penurunan, di evaluasi lebih lanjut”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan telah melakukan evaluasi terhadap hasil pertanian.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Ibu Ir. Hj. Darwamati Manap selaku Bidang Pertanian dan Perikanan pada bulan 26 Desember 2019, pukul 14.00 WIB

“Evaluasi tentu ada, tetapi tidak semua tujuan dari program yang sudah dilaksanakan tercapai, untuk itulah di adakan evaluasi”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan melakukan evaluasi dari program yang sudah dilaksanakan.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama Ibu Sri Alam, Sp,M.Si, selaku Seksi Holtikultura pada tanggal 26 Desember 2019, pukul 15.00 WIB.

“Ya Dinas melakukan evaluasi, kenapa program tidak berjalan sesuai yang diharapkan atau kenapa program ini tidak terwujud sebagai bentuk hasil dari pengembangan maka kami melakukan evaluasi terhadap program, apakah sudah sesuai dan tepat memenuhi kebutuhan petani”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa Dinas telah melakukan evaluasi dari hasil program pengembangan pertanian yang tidak berjalan atau terwujud sesuai tujuan yang di inginkan.

Berikut kutipan wawancara bersama Bapak Amril selaku Ketua Kelompok Tani pada tanggal 03 Januari 2020, pukul 11.00 WIB.

“Bapak kurang mengetahui hal tersebut, tetapi mungkin Dinas sudah melakukan evaluasi mengingat disaat penyuluhan kami menyampaikan keluhan ”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa petani tidak terlalu mengetahui evaluasi yang dilakukan oleh Dinas pertanian dan perikanan terhadap pertanian mereka.

Maka dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa item penilaian dari indikator Alokasi Sumber Daya yaitu Kemampuan Pegawai dalam pengalokasian sumber daya sudah memenuhi kapasitas individu untuk mengembangkan sektor pertanian sesuai dengan tugas suatu pekerjaan, Kerjasama dengan masyarakat dalam Pengalokasian Sumber daya dapat dikatakan baik, serta Evaluasi akan hasil pertanian telah dilaksanakan Dinas terhadap usaha tani para kelompok tani. Kerjasama dengan masyarakat saat

Dari observasi yang dilakukan penulis dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan pegawai didalam pengalokasian sumber daya

dapat dikatakan secara tepat dan efisien dalam mengalokasikan sumber daya ke pada masyarakat atau kelompok tani. Kerjasama antara pegawai Dinas dan petani dalam pengalokasian sumber daya meskipun tidak terlalu berjalan lancar tetapi telah dilakukan komunikasi antara pegawai dan petani sesuai dengan kebutuhan petani. Ketiga evaluasi telah dilakukan terhadap hasil produksi pertanian yang tahun lalu mengalami penurunan dengan menetapkan program, dan perbaikan atau penyempurnaan perencanaan pada program berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian yang dilakukan dilapangan peneliti menemukan: *Pertama*, Pegawai Dinas pertanian mampu untuk mengalokasikan sumber daya secara tepat dan melakukan penyuluhan dalam memberikan informasi ke masyarakat yang berupa komunikasi antara pegawai dengan kelompok petani sehingga adanya pertukaran informasi dari pegawai dengan masyarakat untuk mendapatkan solusi yang akan digunakan dalam pemecahan masalah pertanian. Tetapi peneliti menemukan bahwa pegawai belum melakukan pengawasan secara rutin terhadap perkembangan program yang sudah diberikan kepada kelompok tani. *Kedua*, Kerjasama dengan masyarakat dalam pengalokasian sumber daya yaitu dengan melakukan komunikasi antara pegawai dan petani serta membantu para petani, seperti cara mengolah hasil pertanian, memberikan bibit, semprotan hama, untuk melakukan tugasnya melaksanakan program dan menjalankannya. Tetapi peneliti menemukan bahwa kerjasama yang dilakukan pegawai dengan masyarakat atau kelompok tani belum terlaksana, dikarenakan petani masih enggan untuk melakukan komunikasi dengan pegawai penyuluh dan menyampaikan keluhan-keluhan yang ada sebagaimana

disebutkan. *Ketiga*, Melakukan Evaluasi akan hasil pertanian, Dinas pertanian telah melakukan evaluasi terhadap hasil produksi pertanian para kelompok tani terhadap hasil produksi yang mengalami penurunan, dengan penentuan ukuran, penilaian serta perumusan keputusan yang digunakan untuk perbaikan atau penyempurnaan perencanaan berikutnya yang lebih lanjut demi tercapainya tujuan dari program pengembangan pertanian. Tetapi peneliti menemukan bahwa evaluasi tidak selalu dilakukan terhadap pertanian kelompok tani sehingga penurunan hasil produksi kembali terjadi akibat evaluasi yang tidak berdasarkan pengecekan dan pendataan yang sesuai.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi penelitian dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, Kebijakan Organisasi yang ditetapkan oleh Dinas pertanian dan Perikanan kota pekanbaru dalam menetapkan program dapat dikatakan cukup baik dan tepat sasaran untuk mengembangkan sektor pertanian. *Kedua*, Memotivasi Pegawai dengan memberikan pelatihan yang telah dilaksanakan dan dijalankan bagi Kelompok tani, Tetapi Kegiatan Pembinaan yang dilakukan belum maksimal sehingga petani masih merasa takut kegagalan panen. *Ketiga*, Alokasi Sumber Daya, Pegawai Dinas mampu dan cukup baik dalam melakukan penyuluhan dan pelatihan tetapi belum adanya pengawasan dan evaluasi yang rutin terhadap kelompok tani akan kegiatan pertanian.

C. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Strategi Dinas Pertanian Dan Perikanan Dalam Mengembangkan Sektor Pertanian Di Kota Pekanbaru

Adapun hambatan yang dapat peneliti ketahui mengenai pelaksanaan Strategi Dinas Pertanian Dan Perikanan Dalam Mengembangkan Sektor Pertanian Di Kota Pekanbaru, meliputi:

1. Belum terlaksana secara meratanya pemberian Program yang sudah ditetapkan mulai pemberian bibit pertanian, alat pertanian sesuai dengan kebutuhan kelompok tani, serta belum maksimalnya pemberian pembinaan pelatihan terhadap kelompok tani mulai dari penanaman sampai dengan panen serta penggunaan alat-alat pertanian yang diberikan.
2. Belum dilakukannya pelatihan dan penyuluhan yang rutin oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota pekanbaru terhadap setiap kelompok tani yang telah diberikan bantuan program untuk mengembangkan sektor pertanian mereka.
3. Belum maksimalnya kerjasama yang dilakukan Dinas Pertanian Pekanbaru dengan kelompok tani terkait dengan dilaksanakannya program pengembangan pertanian dan diketahui masih kurangnya pengetahuan petani terhadap alat yang telah diberikan sebagai bantuan program sehingga didalam melaksanakan program belum terealisasi penuh dikarenakan petani yang masih belum mengerti penggunaan dari fasilitas pengembangan pertanian.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Strategi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dalam Mengembangkan Sektor Pertanian dapat dikategorikan cukup terlaksana dimana diketahui Program yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian sudah terlaksana akan tetapi masih banyak petani yang belum mengerti penggunaan dari bantuan program tersebut dalam hal ini dikarenakan belum dilakukannya pelatihan dan penyuluhan yang rutin oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota pekanbaru terhadap setiap kelompok tani yang telah diberikan bantuan program untuk mengembangkan sektor pertanian mereka, dan belum adanya pengawasan yang dilakukan secara rutin dari awal kegiatan program pengembangan pertanian sampai dengan hasil pertanian.
2. Sementara hambatan dalam Strategi Dinas Pertanian dan Perikanan dalam Mengembangkan Sektor Pertanian di Kota Pekanbaru bahwa diketahui belum maksimalnya kerjasama yang dilakukan Dinas Pertanian Pekanbaru dengan kelompok tani dan masih kurangnya pengetahuan petani terhadap alat yang telah diberikan sebagai bantuan program sehingga didalam melaksanakan program belum terealisasi penuh dikarenakan petani yang masih belum mengerti penggunaan dari fasilitas pengembangan pertanian.

B. Saran

1. Hendaknya Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru melakukan Evaluasi secara rutin akan pencapaian hasil pengembangan pertanian yang dilakukan masyarakat atau kelompok tani
2. Perlunya Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru melakukan pengawasan secara rutin terhadap pertanian masyarakat atau kelompok tani agar hasil dari Program yang ditetapkan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan.
3. Hendaknya Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru melakukan pelatihan secara maksimalnya terkait dengan kegiatan program pertanian, kegiatan pembinaan terhadap kelompok tani mulai dari bentuk pengolahan tanah, penanaman bibit, pemupukan, sampai dengan panen sehingga tidak terjadinya penurunan akan hasil pertanian.
4. Perlunya Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru melakukan kerjasama dengan petani dan pegawai agar penetapan program dapat terlaksana sesuai dengan keluhan keluhan petani akan pertaniannya.

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

LEMBAR WAWANCARA

**STRATEGI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA
PEKANBARU DALAM MENGEMBANGKAN SEKTOR PERTANIAN**

PENELITI

Nama : KARTIKA

NPM : 157310763



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku Buku

- Afrizal. 2018. *Strategi Pengembangan Agribisnis Bawang Merah di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru : UNRI
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Akdon. 2011. *Analisis Strategi Kontemporer*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Amsyah, Zulkifli. 2005, *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Anwar, Khairul. 2011. *Ekonomi-Politik Formulasi Kebijakan Dalam Konteks yang Berubah*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Anderson, James E. 2003. *Public Policymaking*. Fifth. USA : Houghton Mifflin Company.
- Asri Dwi Asmarani. 2010. *Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten: Pendekatan Analisis Swot dan AHP*. Jakarta: UI
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002
- Barnard, Chester I. 1938. *The Functions of The Executive*, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
- Bastanul Arifin. 2001. *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia Telaah Struktur, Kasus dan Alternatif Strategi*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Budiarjo, Meriam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- David, Fred R. 2005. *Manajemen Strategis: Konsep*. Jakarta: Salemba Empat
- Dermawan Wibisono. 2005. *Metode Penelitian & Analisis Data*. Jakarta. Salemba Medika.
- Damanik, Khairul Ikhwan, 2010. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta, Buku Obor
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

- El Syabrina .2009. *Analisis Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Provinsi Riau*. Riau:IPB
- Erwan Agus Purwanto dkk. 2010 . *Implementasi Kebijakan Publik*, Gava Media
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Herbert G Hicks. *Organisasi Teori dan Tingkah Laku*,. Terjemahan: G. Kanasapoe'a, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamim. 2005. *Respon Pertumbuhan Terhadap Cekaman Kekeringan dan Konsentrasi Biosfera*, Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka
- Hanani A R.dkk. 2003. *Strategi Pembangunan Pertanian (sebuah pemikiran baru)*.Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Ian Asriandy. 2016. *Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Bissapu Di Kabupaten Bantaeng. Skripsi*. Bantaeng. Fisipol:Universitas Hasanuddin
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jatmiko, R. D. 2004. *Manajemen Strategik*, Edisi Pertama. Malang: UMM Press
- Kansil, CST, dan Cristine. 2008. *Sistem Pemerintah Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Mergono, S, 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta, Rineka Cipta
- Mosher.A.T. 1977.*Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Jakarta: CV Yasaguna.
- Moleong J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mutiara,Ekasari. 2011.*Perencanaan Pengembangan Sektor Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Kabupaten Temanggung. Skripsi*. Semarang:Fakultas Ekonomi Pembangunan UNNES
- M.Alan Febrian.2018. *Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Dalam Melestarikan Bahasa dan Aksara Lampung. Skripsi*. Bandar Lampung:Fisipol Universitas Lampung
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodelogi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta

- Pratomo, S. 2010. *Analisis Peran Sektor Pertanian Sebagai Sektor Unggulan di Kabupaten Boyolali*. Skripsi S1 FE UNS. Surakarta.
- Rasyid, M. Ryass. 1977. *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta. Yasrif Watampone
- Robert M Grant. 1999. *Analisis Strategi Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sadjad.2001. *Analisa Strategi Pengembangan Komuditas Unggulan Daerah. Skripsi*.IPB.Bogor
- Siagian, Sondang P. 2005 *Manajemen Stratejik*, Edisi Keenam. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta
- Syafie Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan di Daerah*, Bandung PT. Refika Aditama
- Tangdankilisan, Hesel Nogi 2003. *Kebijakan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Lukman Offset.
- Wahab, Solihin Abdul.2004. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Zulkifli.2012. *Usulan Penelitian Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru:Fisipol UIR

B.Jurnal

- Bukhori, M. 2014. *Jurnal Sektor Pertanian Terhadap Pembangunan di Indonesia*. <https://www.google.com>. Keyword “Sektor pertanian di Indonesia” Diakses tanggal 8 maret 2019 pukul 1.20 WIB
- Dede Rosdiana. 2011. *Jurnal Analisis Komuditi Unggulan Pertanian Dan Strategi Pengembangannya di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat*. <https://www.google.com/> Keyword “ Pertanian dan strategi pengembangan. Diakses tanggal 8 maret 2019 pukul 1.20 WIB
- Firman,Achmad dan Rochadi Tawaf. 2009. *Jurnal Pembangunan Sektor Pertanian dan Pertenakan di Jawa Barat*. <http://www.google.com>. Keyword “Komuditi unggulan daerah”.
- Ian Asriandy. 2016. *Jurnal Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Bissapu Di Kabupaten Bantaeng. Skripsi*.

Bantaeng. <https://www.google.com/search?>. Keyword “ Strategi Pengembangan” Diakses tanggal 23 September 2019 pukul 2.40 WIB

Rahmadani Nasution.2014.*Jurnal Strategi Pengembangan Usaha Agroindustri Lidah Buaya di di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.* <https://jom.unri.ac.id> . Keyword “Jurnal Strategi”.

Firman,Achmad dan Rochadi Tawaf. 2009. *Jurnal Pembangunan Sektor Pertanian dan Pertenakan di Jawa Barat.* <http://www.google.com>. Keyword “Komuditi unggulan daerah”.

Siagian, Sondang P. 2005 *Jurnal Manajemen Stratejik.* <http://ryanhadiwijayaa.wordpress.com/>, diakses pada 11 Agustus 2019 pukul 01.30 WIB

Syafhendri. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Pekanbaru.* Vol I No 2 : 261-262.2008

Siti Haerani.2010. *Analisis Strategi Pengembangan Komuditas Sayuran Di Kabupaten Poso.* <https://referensiagribisnis.files.wordpress.com/2011/12/> . Diakses tanggal 8 maret 2019 pukul 1.20 WIB

C.Perundangan

Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau Peraturan Walikota nomor 113 tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

D.Sumber Lainnya

BPS,2017. *Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2017*: Badan Pusat Statistik.

BPS,2018.*Kota Pekanbaru dalam Angka 2018*.Pekanbaru:Badan Pusat Statistik.